

Daftar Isi

PERATURAN BUPATI

DAFTAR ISI

BAB 1 - PENDAHULUAN

1.1	Latar Belakang	I-1
1.2	Dasar hukum Penyusunan	1-2
1.3	Hubungan Antar Dokumen	I-4
1.4	Sistematika Penulisan	I-5
1.5	Maksud dan Tujuan	1-6

BAB 2 - Evaluasi Hasil pelaksanaan RKPD Tahun lalu dan Capaian Kinerja

Penyelenggaraan Pemerintahan

2.1.	Aspek Geografi dan Demografi	II-1
2.1.1.	Karakteristik Lokasi dan Wilayah	II-1
2.1.1.1	Letak dan Kondisi Geografis	II-1
2.1.1.2	Topografi dan Fisiografi	II -3
2.1.1.2	Hidrologi	II -6
2.1.1.4	Klimatologi	II -7
2.1.1.5	Penggunaan Lahan	II -8
2.1.1.6	Potensi Pengembangan Wilayah	II -10
2.1.1.7	Wilayah Rawan Bencana	II -18
2.1.1.8	Demografi	II -25
2.2.	Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-31
2.2.1.	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	II-32
2.2.2.	Fokus Kesejahteraan Sosial	II-45
2.2.3.	Fokus kemampuan Ekonomi Daerah	II-45
2.2.4.	Fokus Iklim Berinvestasi	II-46
2.2.5	Fokus Sumberdaya Manusia	II-48

BAB 3 - Perubahan Asumsi Dasar Kebijakan Umum APBD

3.1	Perubahan Asumsi Dasar Kebijakan Umum APBD	III-1
3.2	Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah	III-9

3.3 Perubahan Kebijakan Belanja Daerah

III-9

BAB 4 - Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan IV-1

BAB 5 - Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Perubahan V-1

BAB 6 - Penutup VI-1

Lampiran

1. Pendapatan dan Belanja Daerah RKPD
2. Perubahan Program/Kegiatan SKPD
3. Evaluasi RKPD Tahun 2016 s/d Triwulan II (Semester I)

Bab I

Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Dokumen RKPD berperan sangat strategis bagi Pemerintah Kabupaten Gresik. RKPD menjamin konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah. Dalam hal ini Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan Kabupaten Gresik Tahun 2016 memperhatikan Keputusan Bersama DPRD Kabupaten Gresik Dan Bupati Gresik Provinsi Jawa Timur Nomor 188/3/437.40/2016 dan 188/5/437.12/2016 Tentang Persetujuan Bersama Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021 untuk Ditetapkan Menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Gresik.

Dokumen RKPD yang memperhatikan keputusan bersama tersebut mengarahkan proses penyusunan Rencana Kerja (RENJA) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD). RKPD menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS), RAPBD dan APBD. RKPD menjadi instrumen bagi pemerintah daerah untuk mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah dan instrumen untuk mengukur capaian target kinerja program pembangunan jangka menengah, target standar pelayanan minimal dan kinerja pelayanan SKPD. Dokumen RKPD Perubahan 2016 juga menjadi acuan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), dan menyediakan informasi bagi pemenuhan Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD). RKPD dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan, seperti :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah; Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab. Gresik Tahun 2016
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
- c. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam perturan perundang-undangan

Berdasarkan uraian di atas dan dalam kerangka melaksanakan mandatory peraturan perundangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Gresik menyusun dokumen Perubahan RKPD ini sebagai pedoman penyempurnaan pelaksanaan pembangunan tahun 2016.

1.2. **Dasar Hukum Penyusunan**

Ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai landasan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Tahun 2016, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 ;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
8. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
21. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 -2019;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;

27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 – 2031;
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030.

1.3. **Hubungan Antar Dokumen RPJMD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Lainnya**

Secara substansial, penyusunan RKPD Perubahan Kabupaten Gresik Tahun 2016 berpedoman kepada:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019;
2. Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019;
3. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Gresik Tahun 2005 -2025 Periode sasi ketiga;

Selain keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya, RPJMD Kabupaten Gresik memperhatikan Keputusan Bersama DPRD Kabupaten Gresik Dan Bupati Gresik Provinsi Jawa Timur Nomor 188/3/437.40/2016 dan 188/5/437.12/2016 Tentang Persetujuan Bersama Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021 untuk Ditetapkan Menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Gresik.

1.4. **Sistematika Penulisan**

Sistematika penyajian Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Kabupaten Gresik Tahun 2016 terdiri dari:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bagian ini menjelaskan latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika dokumen RKPD serta maksud dan tujuan.

BAB II : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CARA PENCAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Menjelaskan gambaran umum kondisi daerah, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD, serta permasalahan pembangunan daerah.

BAB III: Perubahan Asumsi Dasar Kebijakan Umum APBD

Memuat penjelasan tentang: (1) arah kebijakan ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah, yang meliputi kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, tantangan dan prospek perekonomian daerah, (2) arah kebijakan keuangan daerah yang meliputi proyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaan, arah kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

BAB IV : PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Berisikan tujuan dan sasaran pembangunan daerah serta prioritas pembangunan.

BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.

BAB VI : PENUTUP

Memuat kesimpulan dan kaidah pelaksanaan dari RKPD

1.5. **Maksud dan Tujuan**

Maksud Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016 adalah sebagai acuan dalam Penyusunan KUA PPAS Perubahan 2016. Sedangkan tujuan RKPD Perubahan Tahun 2016 adalah menjaga konsistensi Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dengan Dokumen Tahunan.

BAB II

Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu Dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

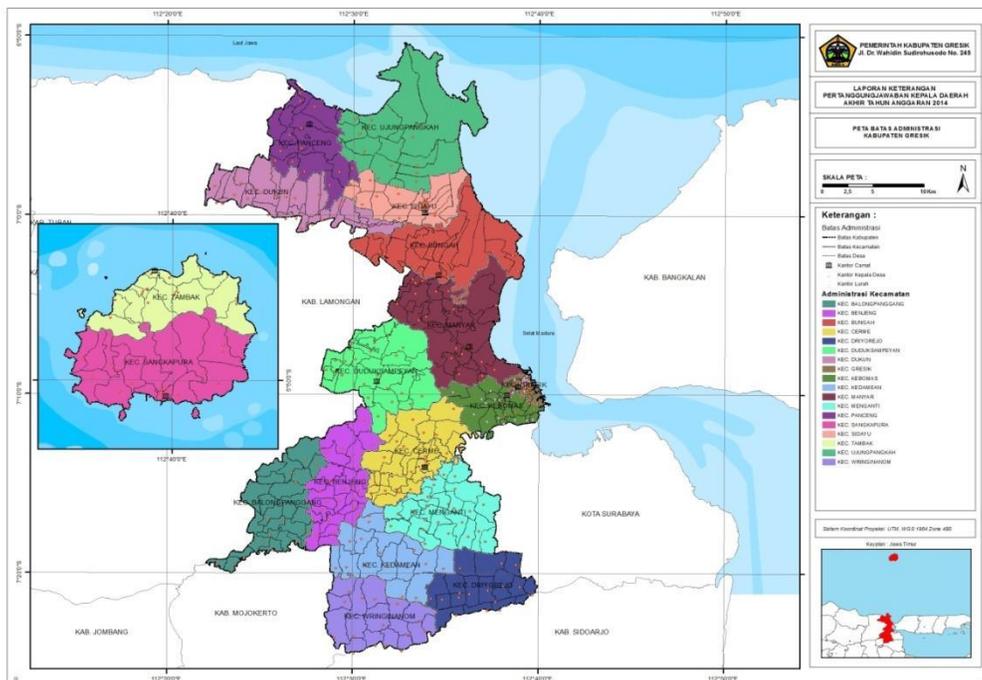
2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

2.1.1.1 Letak dan Kondisi Geografis

Lokasi Kabupaten Gresik terletak di sebelah Barat Laut Kota Surabaya yang merupakan Ibukota Provinsi Jawa Timur dengan luas wilayah 1.191,25 km². Secara administratif, Kabupaten Gresik terbagi menjadi 18 Kecamatan terdiri dari 330 Desa dan 26 Kelurahan. Sedangkan secara geografis, wilayah Kabupaten Gresik terletak antara 112° sampai 113° Bujur Timur dan 7° sampai 8° Lintang Selatan merupakan dataran rendah dengan ketinggian 2 sampai 12 meter di atas permukaan air laut kecuali Kecamatan Panceng yang mempunyai ketinggian 25 meter diatas permukaan air laut.

Sebagian wilayah Kabupaten Gresik merupakan daerah pesisir pantai dengan panjang pantai 140 km, 69 km di daratan Pulau Jawa memanjang mulai dari Kecamatan Kebomas, Gresik, Manyar, Bungah, Sidayu, Ujungpangkah, dan Panceng serta 71 km di Kecamatan Sangkapura dan Tambak yang berada di Pulau Bawean.

Wilayah Kabupaten Gresik sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Madura dan Kota Surabaya, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Mojokerto, serta sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Lamongan. Peta administrasi Kabupaten Gresik sebagaimana pada gambar berikut:



Sumber data: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016

Gambar 2.1
Peta Administrasi Kabupaten Gresik

Kabupaten Gresik merupakan kawasan yang berpotensi berkembang pesat dalam konstelansi Surabaya Metropolitan Area. Posisi Strategis Kabupaten Gresik terlihat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2011-2031 dimana Kawasan perkotaan yang diarahkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional di Provinsi Jawa Timur adalah Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila (Gresik–Bangkalan–Mojokerto–Surabaya–Sidoarjo–Lamongan).

Berikut ini gambar yang menunjukkan posisi strategis Kabupaten Gresik di Provinsi Jawa Timur:



Sumber data: Badan Perencanaan Pe
Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016

embangan

Gambar 2.2
Peta Kabupaten Gresik terhadap Provinsi Jawa Timur

Dilihat dari posisi geografis, Kabupaten Gresik berada pada lokasi yang sangat strategis bagi perekonomian nasional, karena terletak di selat Madura dan memiliki wilayah pesisir sepanjang 140 km. Hal ini menjadikan Kabupaten Gresik tergabung dalam Kawasan Andalan GERBANGKERTOSUSILA (Gresik–Bangkalan–Mojokerto–Surabaya–Sidoarjo–Lamongan) dengan sektor unggulan industri, perdagangan dan jasa, pertanian, perikanan, dan pariwisata, sehingga diharapkan kawasan tersebut menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi bahkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi bagi daerah-daerah disekitarnya.

2.1.1.2 Topografi dan Fisiografi

Pada umumnya Ketinggian tempat di Wilayah Kabupaten Gresik berada pada 0 – 500 m diatas permukaan laut (dpl) pada elevasi terendah terdapat di daerah sekitar muara Sungai Bengawan Solo dan Kali Lamong.

Tabel 2.1

Luas Daerah Berdasarkan Ketinggian (Ha) Kabupaten Gresik

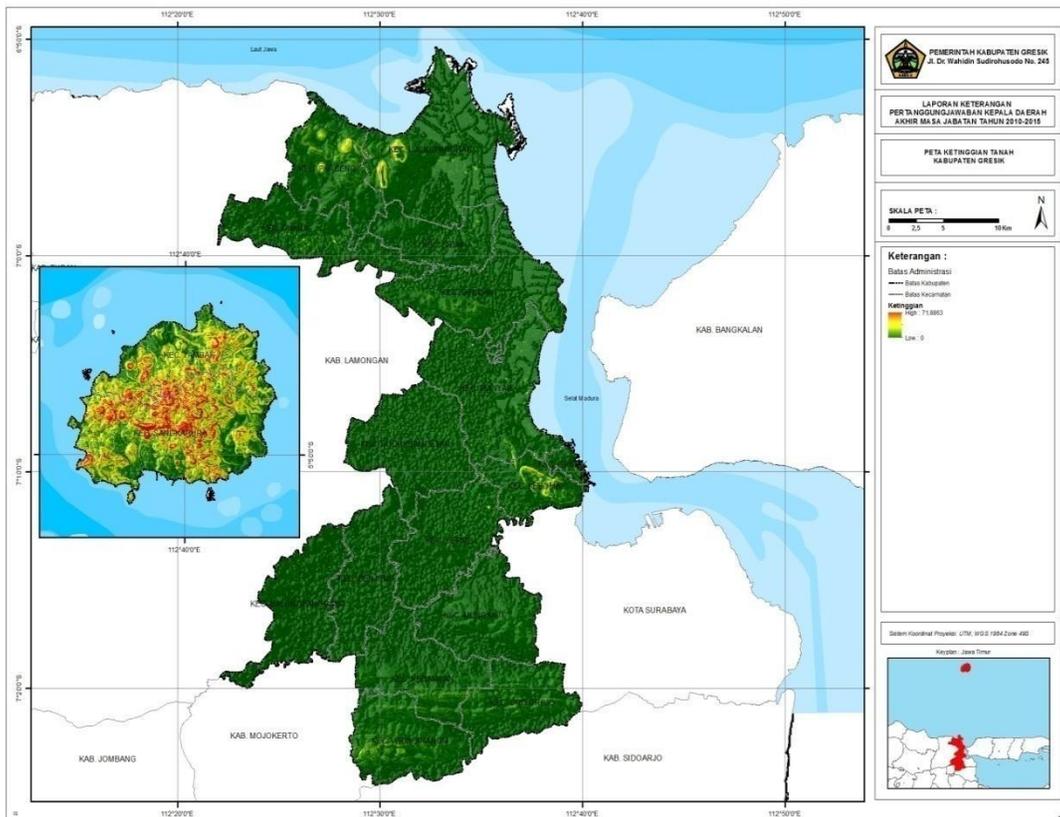
No	Kecamatan	Ketinggian			Jumlah
		0 – 10	10 – 20	> 20	
		Meter dpl	Meter dpl	Meter dpl	
1	Wringinanom	0,00	6.254,00	0,00	6.262,00
2	Driyorejo	0,00	5.130,00	0,00	5.130,00
3	Kedamean	6.588,00	0,00	0,00	6.596,00
4	Menganti	6.196,00	0,00	0,00	6.367,00
5	Cerme	6.126,00	0,00	0,00	6.126,00
6	Benjeng	0,00	6.862,00	0,00	6.871,00
7	Balongpanggung	7.167,00	0,00	0,00	7.167,00
8	Duduksampeyan	7.440,00	0,00	0,00	7.449,00
9	Kebomas	2.966,00	0,00	0,00	3.433,00
10	Gresik	524,00	0,00	0,00	799,00
11	Manyar	8.287,00	0,00	0,00	8.671,00
12	Bungah	8.022,00	0,00	0,00	7.936,00
13	Sidayu	4.521,00	0,00	0,00	4.521,00
14	Dukun	5.909,00	0,00	0,00	5.909,00
15	Panceng	0,00	0,00	6.318,00	6.259,00
16	Ujungpangkah	9.470,00	0,00	0,00	10.406,00
17	Sangkapura	11.872,00	0,00	0,00	11.872,00
18	Tambak	7.755,00	0,00	0,00	7.739,00
	Jumlah	92.843,00	18.246,00	6.318,00	119.513,00
	Prosentase	79,08	15,54	5,38	100,00

Sumber : RTRW Kabupaten Gresik 2010-2030

Distribusi wilayah di Kabupaten Gresik berdasarkan ketinggian dapat diuraikan sebagai berikut :

- Wilayah dengan ketinggian 0 –10 mdpl seluas 92.843,00 ha atau sekitar 79,08% dari seluruh luas wilayah Kabupaten Gresik.
- Wilayah dengan ketinggian 10 – 20 mdpl mempunyai luas 18.246,00 ha atau sekitar 15,54 % .
- Ketinggian diatas 20 mdpl mempunyai luas 6.318,00 ha atau sekitar 5,38%.

Adapun distribusi ketinggian wilayah Kabupaten Gresik dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber data : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Gresik Tahun 2014

Gambar 2.3

Peta Ketinggian Tanah Kabupaten Gresik

Kondisi topografi pada Kabupaten Gresik bervariasi pada kemiringan 0 – 2%, 3 – 15%, dan 16 – 40% serta lebih dari 40 %. Sebagian besar mempunyai kemiringan 0 - 2% mempunyai luas 94.613,00 ha atau sekitar 80,59 %, sedangkan wilayah yang mempunyai kemiringan lebih dari 40 % lebih sedikit 1.072,23 ha atau sekitar 0,91 %. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.2 sebagai berikut.

Tabel 2.2

Luas Daerah Berdasarkan Kelerengan (Ha) Kabupaten Gresik

No	Kecamatan	Lereng				Jumlah
		0 - 2 %	3 - 15 %	16 - 40 %	>40 %	
1	Wringinanom	3.968,00	2.286,00	0,00	0,00	6.262,00
2	Driyorejo	4.680,00	450,00	0,00	0,00	5.130,00
3	Kedamean	5.684,00	904,00	0,00	0,00	6.596,00
4	Menganti	6.196,00	0,00	0,00	0,00	6.367,00
5	Cerme	6.126,00	0,00	0,00	0,00	6.126,00
6	Benjeng	6.862,00	0,00	0,00	0,00	6.871,00
7	Balompanggung	7.167,00	0,00	0,00	0,00	7.167,00
8	Duduksampeyan	7.440,00	0,00	0,00	0,00	7.449,00
9	Kebomas	2.409,00	518,00	39,00	0,00	3.433,00
10	Gresik	524,00	0,00	0,00	0,00	799,00
11	Manyar	8.197,00	90,00	0,00	0,00	8.671,00

12	Bungah	8.022,00	0,00	0,00	0,00	7.936,00
13	Sidayu	4.521,00	0,00	0,00	0,00	4.521,00
14	Dukun	5.909,00	0,00	0,00	0,00	5.909,00
15	Panceng	3.897,00	2.324,00	72,00	25,00	6.259,00
16	Ujungpangkah	8.063,00	972,00	243,00	192,00	10.406,00
17	Sangkapura	4.805,00	2.050,34	4.216,68	799,98	11.872,00
18	Tambak	143,00	2.656,94	4.899,81	55,25	7.739,00
	Jumlah	94.613,0	12.251,28	9.470,49	1072,23	119.513,00
	Prosentase	80,59	10,43	8,07	0,91	100,00

Sumber : RTRW Kabupaten Gresik 2010-2030

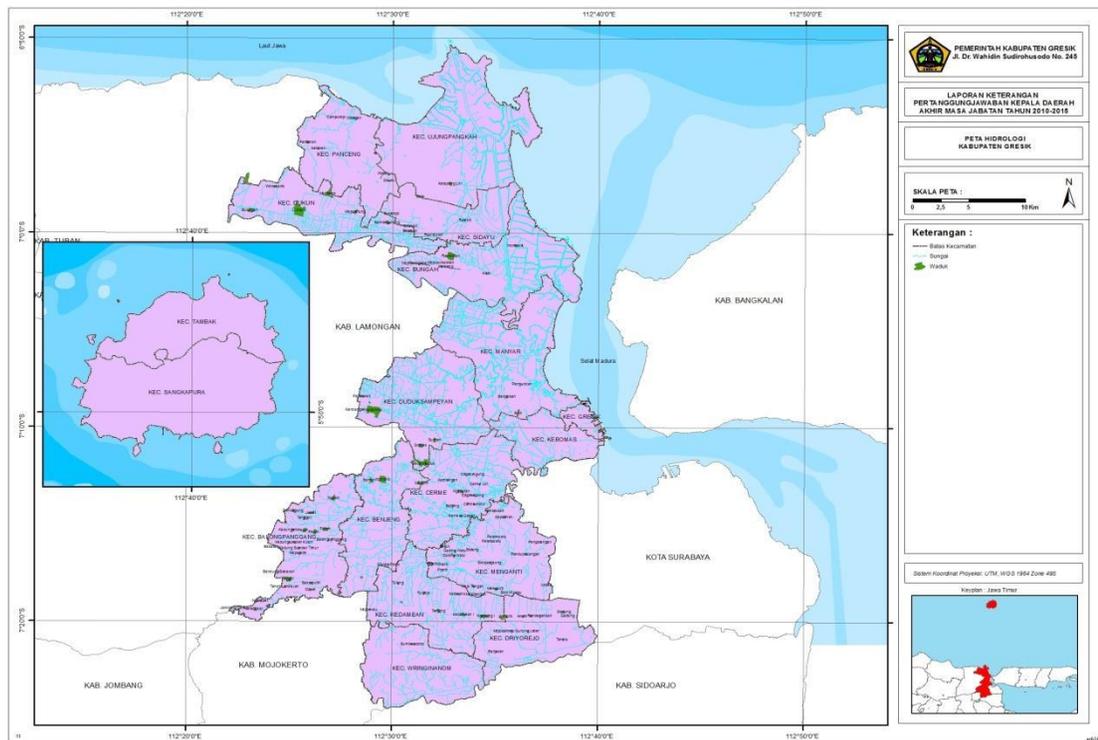
Berdasarkan data di atas, dijelaskan bahwa mayoritas daratan Gresik berada pada kelerengannya 0-2% dengan luas wilayah sebesar 94.613 Ha (80.59%) sedangkan presentase terkecil berada pada kelerengannya lebih dari 40% dengan luas 1072 Ha yang tersebar pada Kecamatan Ujungpangkah dan 2(dua) kecamatan di Pulau Bawean yaitu Tambak dan Sangkapura.

2.1.1.3 Hidrologi

Keadaan permukaan air tanah di Wilayah Kabupaten Gresik pada umumnya relatif dalam, hanya daerah-daerah tertentu di sekitar sungai atau rawa-rawa saja yang mempunyai permukaan air tanah agak dangkal.

Pola aliran sungai di Kabupaten Gresik memperlihatkan wilayah Gresik merupakan daerah muara Sungai Bengawan Solo dan Kali Lamong dan juga dilalui oleh Kali Surabaya di Wilayah Selatan. Sungai-sungai ini memiliki sifat aliran dan kandungan unsur hara yang berbeda. Sungai Bengawan Solo mempunyai debit air yang cukup tinggi dengan membawa sedimen lebih banyak dibandingkan dengan Kali Lamong, sehingga pendangkalan di Sungai Bengawan Solo lebih cepat. Dengan adanya peristiwa tersebut mengakibatkan timbulnya tanah-tanah oloran yang seringkali oleh penduduk dimanfaatkan untuk lahan perikanan.

Selain dialiri oleh sungai-sungai tersebut di atas keadaan hidrologi Kabupaten Gresik juga ditentukan oleh adanya waduk, embung, mata air, pompa air dan sumur bor.



Sumber data : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Gresik Tahun 2015

Gambar 2.4

Peta Sungai dan Waduk Kabupaten Gresik

2.1.1.4 Klimatologi

Seperti halnya kondisi Jawa Timur lainnya, di wilayah Kabupaten Gresik mempunyai kondisi iklim yang hampir sama. Iklim Kabupaten Gresik termasuk tropis dengan temperatur rata-rata 28,5°C dan kelembaban udara rata-rata 2.245 mm per tahun.

Temperatur minimum terjadi pada bulan Juli sedangkan temperatur tertinggi terjadi pada bulan Oktober. Radiasi matahari terbesar 84 % terjadi pada bulan Maret, kecepatan angin berkisar antara 4-6 per detik dengan arah rata-rata ke Selatan. Iklim daerah Kabupaten Gresik dibedakan menjadi :

- a. musim kering terjadi pada bulan Juni sampai dengan Bulan September;
- b. musim penghujan basah terjadi pada bulan Desember sampai dengan bulan Maret;
- c. musim peralihan dari musim kemarau sampai musim penghujan terjadi pada bulan Oktober dan November; dan
- d. musim peralihan dari musim penghujan ke musim kemarau terjadi pada bulan April dan Mei.

2.1.1.5 Penggunaan Lahan

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030 rencana peruntukan penggunaan lahan di Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut:

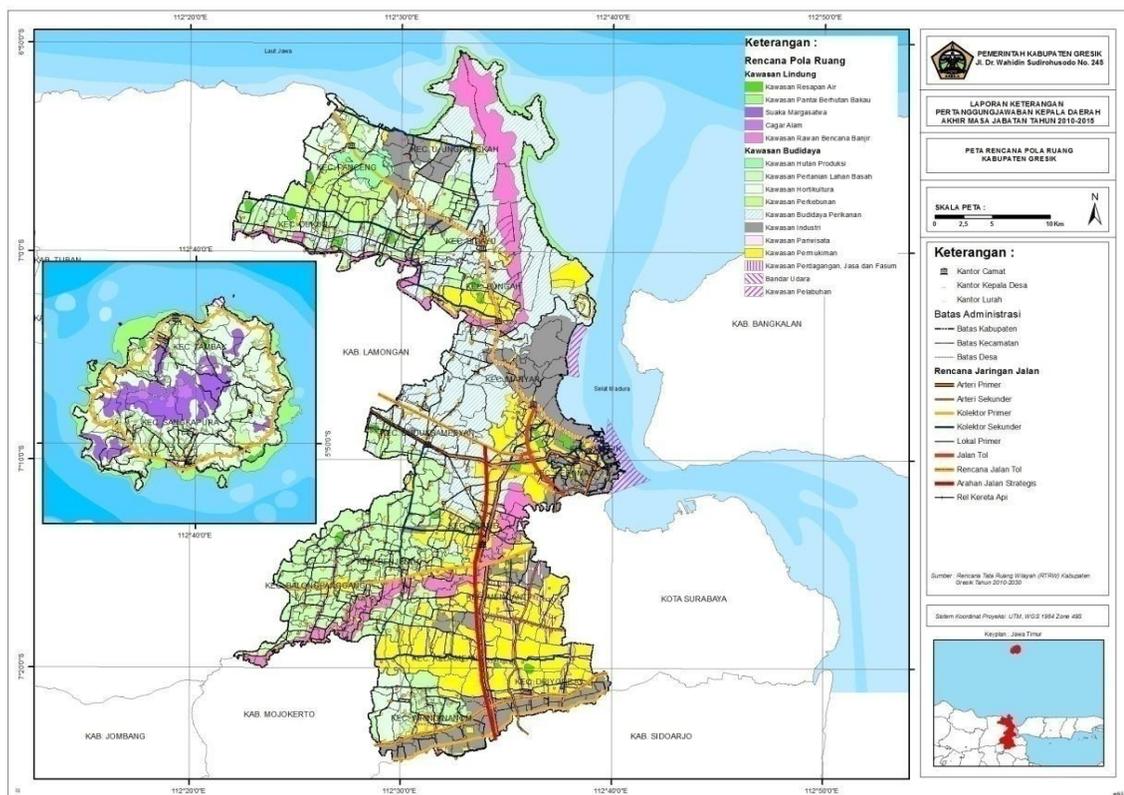
A. Kawasan Lindung

- Kawasan Rawan Bencana Banjir 9,426.12 hektar;
- Kawasan Pantai Berhutan Bakau 5,828.62 hektar;
- Kawasan Terumbu Karang 5,387.00 hektar;
- Blok Rimba Suaka Marga Satwa 3,831.60 hektar;
- Kawasan Resapan Air 1,252.58 hektar;
- Kawasan Cagar Alam 725.00 hektar;

B. Kawasan Budidaya

- Kawasan Permukiman 26,063.55 hektar;
- Kawasan Pertanian Lahan Basah 23,372.70 hektar;
- Kawasan Perikanan Budidaya 21,678.36 hektar;
- Kawasan Hortikultura 16,885.48 hektar;
- Kawasan Industri 12,448.03 hektar;
- Kawasan Perdagangan, Jasa, dan Fasum 6,644.01 hektar;
- Kawasan Perkebunan 2,573.67 hektar;
- Kawasan Hutan Produksi 1,017.00 hektar;
- Kawasan Pertambangan 817.25 hektar;
- Kawasan Pariwisata 82.85 hektar;
- Kawasan Bandar Udara 68.44 hektar;
- Kawasan Pelabuhan 1,257.69 hektar;

Peta rencana pola ruang Kabupaten Gresik sebagaimana pada gambar berikut:



Sumber data : RTRW Kab. Gresik Tahun 2010- 2030

Gambar 2.5
Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Gresik

Dalam perkembangannya sampai dengan tahun 2015, kondisi eksisting penggunaan lahan berdasarkan jenis peruntukan dalam RTRW adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Eksisting Penggunaan Lahan
Berdasarkan Jenis Peruntukan dalam RTRW Tahun 2015

KAWASAN LINDUNG			
No	Jenis Peruntukan Ruang	Perda RTRW Kab. Gresik (ha)	Eksisting Penggunaan Lahan(ha)
1	Kawasan Rawan Bencana Banjir	9,426.12	-
2	Kawasan Pantai Berhutan Bakau	5,828.62	1,804.18
3	Kawasan Terumbu Karang	5,387.00	-
4	Blok Rimba Suaka Marga Satwa	3,831.60	3,831.60
5	Kawasan Resapan Air	1,252.58	1,040.61
6	Kawasan Cagar Alam	725.00	725.00
Jumlah		26,450.92	7,401.39
KAWASAN BUDIDAYA			

1	Kawasan Permukiman	26,063.55	15,331.14
2	Kawasan Pertanian Lahan Basah	23,372.70	39,572.98
3	Kawasan Perikanan Budidaya	21,678.36	31,092.21
4	Kawasan Hortikultura	16,885.48	191.79
5	Kawasan Industri	12,448.03	10,108.57
6	Kawasan Perdagangan, Jasa, dan Fasum	6,644.01	2,797.65
7	Kawasan Perkebunan	2,573.67	10,761.86
8	Kawasan Hutan Produksi	1,017.00	6,544.01
9	Kawasan Pertambangan	817.25	952.34
10	Kawasan Pariwisata	82.85	7.92
11	Kawasan Bandar Udara	68.44	72.82
12	Kawasan Pelabuhan	1,257.69	366.89
Jumlah		112,909.02	117,792.25
		139,359.94	125,193.64

Sumber: Study Peninjauan kembali Perda RTRW Tahun 2015

Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa eksisting penggunaan lahan berdasarkan perencanaan (Peninjauan kembali RTRW Tahun 2015) telah mencapai 89,8%. Adapun penggunaan lahan yang melebihi luas perencanaan meliputi kawasan pertanian lahan budaya, kawasan perikanan budidaya, kawasan perkebunan, kawasan pertambangan, dan kawasan bandar udara sedangkan eksisting seluruh kawasan lindung dan sebagian kawasan budidaya belum sebesar luas lahan yang direncanakan.

2.1.1.6 Potensi Pengembangan Wilayah

Perkembangan potensi unggulan Kabupaten Gresik pada tahun 2014-2015 antara lain:

- 1) Dalam Bidang Perindustrian pada tahun 2015 jumlah industri sebanyak 6.653 industri, sedangkan pada tahun 2014 sebanyak 6.525 industri sehingga dari tahun 2014 ke tahun 2015 terjadi kenaikan jumlah industri sebanyak 128 industri. Perkembangan industri dilihat dari penerbitan tanda daftar industri (TDI) juga meningkat sebanyak 11 tanda daftar industri, seperti terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.4.
Jumlah Industri dan Penerbitan Tanda Daftar Industri (TDI)
di Kabupaten Gresik Tahun 2011-2015

No	Uraian	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015
1	Industri	Industri	6.293	6.369	6.451	6.525	6.653
2	Tanda Daftar Industri (TDI)	Unit	61	45	25	30	41

Sumber data: Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik Tahun 2016

- 2) Dalam Bidang Perdagangan, penerbitan SIUP meningkat 19,6% pada Tahun 2015 atau sebanyak 264 SIUP. Penerbitan SIUP pada tahun 2015 sebanyak 1.612 SIUP sedangkan tahun 2014 sebanyak 1.348 SIUP. Hal ini selaras dengan penyerapan tenaga kerja pada tahun 2015 yang tercatat sebanyak 175.131 orang atau mengalami peningkatan sebesar 26% dengan penambahan penyerapan sebanyak 36.128 jiwa dari penyerapan tenaga kerja pada tahun 2014 yang mencapai 138.955 jiwa. Sedangkan nilai investasi perdagangan pada tahun 2015 mencapai Rp19.766.408.000,00 atau mengalami pertumbuhan 185% sebanyak Rp12.829.886.000,00 dari nilai investai pada tahun 2014 yang mencapai Rp6.936.522.000,00 seperti terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.5.
Jumlah SIUP, Nilai Investasi dan Penyerapan Tenaga Kerja
di Kabupaten Gresik Tahun 2011-2015

No.	Uraian	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015
1	Surat Izin Usaha Perdagangan	SIUP	229	1.041	1.166	1.248	1.612
-	SIUP Perusahaan Mikro	SIUP		40	178	186	342
-	SIUP Perusahaan Kecil	SIUP		761	799	858	968
-	SIUP Perusahaan Menengah	SIUP	160	188	170	193	290
-	SIUP Perusahaan Besar	SIUP	69	52	19	11	12
2	Investasi Perdagangan						
	Nilai Investasi (juta)	Rp.	367,5	907,559	2.318,129	6.936,522	19.766,408.
	Investasi Tahun sebelumnya (juta)	Rp.		367,5	907,559	2.318,129	6.936,522
	Pertumbuhan Investasi (juta)	Rp.		540,059	1.410, 570	4.618,392	12.829,886
3	Penyerapan tenaga kerja	Orang	12.271	11.137	12.253	11.131	175.083

- 3) Dalam bidang pertanian di Kabupaten Gresik tahun 2015 total produksi pertanian sebanyak 549.764,19 ton sedangkan pada tahun 2014 sebanyak 553.633 ton sehingga dari tahun 2014 ke tahun 2015 mengalami penurunan produksi pertanian sebanyak 3.868,81 ton, hal ini disebabkan karena lahan komoditas untuk tanaman jagung, kedelai, kacang tanah, ubi kayu, dan ubi jalar digunakan untuk komoditas yang lain karena harga jualnya rendah, seperti terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.6.
Produksi Pertanian di Kabupaten Gresik Tahun 2011-2015

No.	Uraian	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015
1	Padi	Ton	296.863,32	386.800	376.546,05	395.594	403.906,02
2	Jagung	Ton	76.366,27	152.274	135.280,14	131.767	127.218,20
3	Kedelai	Ton	1.388,70	2.132	1.368,68	1.952	1.325,87
4	Kacang Tanah	Ton	54.028,00	3.756	5.028,89	3.451	2.924,94
5	Kacang Hijau	Ton	-	1.537	2.792,98	2.911	3.025,94
6	Ubi kayu	Ton	-	12.830	13.526,56	14.854	10.425,68
7	Ubi Jalar	Ton	-	2.797	3.192,72	3.104	937,54
	JUMLAH	Ton	428.646,29	562.126	537.736,02	553.633	549.764,19

- 4) Dalam bidang peternakan, jumlah populasi ternak di Kabupaten Gresik pada tahun 2015 sebanyak 14.604.313 ekor sedangkan pada tahun 2014 sebanyak 7.538.593 ekor sehingga dari tahun 2014 ke tahun 2015 mengalami kenaikan sebanyak 7.065.720 ekor, selain itu produksi ternak juga mengalami kenaikan sebesar 122 ton. Adapun jumlah populasi ternak dan produksi hasil ternak secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.7.
Populasi Ternak dan Produksi hasil Ternak di Kabupaten Gresik Tahun 2011-2015

No.	Uraian	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015
1	Populasi ternak	Ekor	3.607.530	3.574.955	3.568.270	7.538.593	14.604.313
	terdiri dari:						
-	Sapi	Ekor	105.878	58.683	44.703	47.697	50.514
-	Kerbau	Ekor	176	297	198	198	198
-	Kuda	Ekor	236	236	236	215	209
-	Kambing	Ekor	57.511	65.210	65.270	66.357	67.602
-	Domba	Ekor	30.134	30.396	30.396	30.898	32.533
-	Ayam ras petelur	Ekor	133.045	133.045	134.700	140.000	152.300
-	Ayam bukan ras	Ekor	640.840	645.838	647.762	663.830	680.930
-	Ayam ras pedaging	Ekor	2.600.000	2.600.000	2.603.500	6.532.000	13.560.000
-	Itik	Ekor	26.450	27.990	28.120	27.920	29.145

-	Entok dan angsa	Ekor	13.260	13.260	13.385	29.478	30.882
2	Produksi hasil ternak	Ton	13.099,1	10.208,53	13.491,51	13.580,12	13.694,72
-	Terdiri dari:						
-	Telur	Ton	2.464,38	7.969,54	2.725,26	2.754,96	2.798,52
-	Susu	Ton	299,67	228,15	306,14	315	309,96
-	Daging	Ton	10.335,1 2	2.010,84	10.460,11	10.510,16	10.586,24

Sumber data : Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik Tahun 2016

- 5) Dalam bidang perikanan, produksi bidang perikanan di Kabupaten Gresik pada tahun 2015 sebanyak 98.367,87 ton sedangkan pada tahun 2014 sebanyak 97.222,79 ton sehingga dari tahun 2014 ke tahun 2015 mengalami kenaikan sebanyak 1.145 ton, selain itu produktivitas lahan tambak juga mengalami kenaikan sebesar 20 ton/ha serta sarana prasarana berupa perahu/kapal penangkap ikan juga mengalami kenaikan sebesar 406 unit, sedangkan areal budidaya tahun 2015 seluas 31.838,02 Ha. Adapun jumlah produksi perikanan, produktivitas, jumlah kapal dan areal budi daya perikanan secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.8.
Produksi Perikanan, Produktivitas, Jumlah Kapal Dan Areal Budidaya Perikanan di
Kabupaten Gresik Tahun 2011-2015

No.	Uraian	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015
1	Produksi perikanan	Ton	56.492,69	77.288,75	102.657,71	96.306,04	98.367,87
a.	Budi Daya :	Ton	36.649,42	59.903,75	83.414,45	78.010,06	79.759,41
	- Udang Windu	Ton	2.093,34	3.027,66	4.005,80	3.375,70	3.346,85
	- Udang Vanamae	Ton	4.585,89	7.428,71	7.160,62	6.237,08	6.181,54
	- Bandeng	Ton	28.428,08	47.700,30	68.811,44	65.975,68	67.998,24
	- Kerapu	Ton	15,41	9,9	12	66,71	125,89
	- Nila	Ton	1.526,70	1.737,18	3.424,59	2.354,89	2.106,89
b.	Penangkapan	Ton	19.492,84	16.965,00	18.380,99	17.379,23	18.122,28
c.	Perairan Umum	Ton	350,43	420	862,27	916,75	486,18
2	Produktivitas Lahan Tambak		191,02	456,04	560,04	599,56	619,28
	- Payau	Ton/Ha	135,75	222,94	258,82	277,96	286,76
	- Tawar	Ton/Ha	55,27	233,1	301,22	321,6	332,52
3	Jumlah perahu/kapal penangkap ikan	Unit			31.964	4.519	4.925
4	Areal Budidaya	Ha	0,00	0,00	31.964,07	17.335,02	31.838,02
	- Tambak payau	Ha			17.335,02	17.335,02	17.335,02
	- Tambak tawar/kolam	Ha			14.629,05	14.730,00	14.503,00

Sumber data : Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik Tahun 2016

6) Investasi daerah di Kabupaten Gresik pada tahun 2014 berdasarkan realisasi persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri sebesar 8.009.042.000.000,00 dan pada tahun 2015 menurun menjadi Rp671.413.600.000,00 atau turun 91,62%, sedangkan realisasi persetujuan Penanaman Modal Asing pada tahun 2014 sebesar US\$ 215.390.800 dan pada tahun 2015 menurun sebesar US\$ 152.925.400 atau menurun 29%. Adapun jumlah investasi secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.9.

Jumlah Investasi di Kabupaten Gresik Tahun 2011-2015

No	Uraian	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015
1	Realisasi Persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	Juta Rupiah	1.286.625,50	3.292.566	4.794.719	8.009.042,00	671.413,60
2	Realisasi Persetujuan Penanaman Modal Asing (PMDA)	US\$	138.956,5	715.790,7	842.750,30	215.390.800	152.925.400

Sumber data : Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik Tahun 2016

Penurunan investasi yang terjadi di Kabupaten Gresik baik dari sektor penanaman modal dalam negeri maupun asing disebabkan kondisi perekonomian global yang sedang mengalami resesif pada tahun 2015. Keterpurukan ekonomi global berdampak secara massif terhadap pertumbuhan investasi terutama investasi padat modal sebagaimana di Kabupaten Gresik seperti nilai tukar rupiah yang terus melemah, meningkatnya suku bunga bank, menurunnya ekspor dan tingkat harga ekspor di pasar dunia, hingga keterpurukan harga komoditas. Salah satu indikator populer yang menunjukkan gejala perekonomian nasional adalah nilai tukar rupiah yang mencapai Rp.14.000 per US Dollar meskipun tidak mencapai nilai kurs terparah pada krisis ekonomi 1997.



Gambar 2.6

Nilai tukar Rupiah terhadap US Dollar selama 2011-2015

Sumber data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik Tahun 2015

7) Potensi Kepelabuhanan

Kabupaten Gresik memiliki wilayah pesisir pantai yang potensial untuk kegiatan kepelabuhanan. Keberadaan pelabuhan di Kabupaten Gresik cukup penting untuk mendukung akses penyediaan bahan baku dan pemasaran produk industri yang telah berkembang di Kabupaten Gresik. Di sepanjang pesisir pantai Kecamatan Kebomas, Gresik, dan Manyar terdapat 1 (satu) pelabuhan umum yang dikelola oleh PT. Pelindo III Cabang Gresik dan 8 (delapan) terminal khusus yang dikelola oleh Perusahaan Swasta/BUMN untuk kepentingan sendiri dan melayani umum dalam kondisi tertentu. Adapun 8 (delapan) terminal khusus tersebut yaitu:

1. Terminal Khusus PT. Sumbermas Indah Playwood
2. Terminal Khusus PT. Wilmar Nabati
3. Terminal Khusus PT. Semen Gresik
4. Terminal Khusus PT. PLN PJB 2 Gresik
5. Terminal Khusus PT. Pertamina
6. Terminal Khusus PT. Petrokimia Gresik
7. Terminal Khusus PT. Smelthing
8. Terminal Khusus PT. Maspion

Pemerintah Kabupaten Gresik juga menggagas pembangunan Pelabuhan Internasional Kalimireng di Kecamatan Manyar yang

pembangunannya sudah dilaksanakan mulai tahun 2014 oleh PT. BJTI (Berlian Jasa Terminal Indonesia) dan PT. AKR (Aneka Kimia Raya).

8) Potensi Wisata

Kabupaten Gresik merupakan salah satu Kabupaten di Wilayah Propinsi Jawa Timur yang memiliki Potensi pariwisata yang cukup beragam diantaranya: Wisata Alam, Peninggalan Sejarah, Wisata Seni dan Budaya. Beragamnya wisata ini merupakan modal yang potensial bagi usaha pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Gresik. Potensi kepariwisataan perlu dikembangkan guna menunjang pembangunan daerah dan pembangunan kepariwisataan pada khususnya.

Adapun obyek wisata tersebut antara lain:

A. Wisata Alam

- Danau Kastoba (Kec. Tambak)
- Air Panas Kebondaya (Kec. Sangkapura)
- Telaga Ngipik/ Giri Wana Tirta (Kec. Kebomas)
- Bukit Surowiti (Kec. Panceng)
- Penangkaran Rusa Bawean (Kec. Sangkapura)
- Pantai Pulau Cina (Kec. Sangkapura)
- Air Terjun Patar Selamat (Kec. Sangkapura)
- Air Terjun Udhuk-udhuk (Kec. Tambak)
- Pantai Labuhan (Kec. Tambak)
- Pantai Nyimas (Kec. Sangkapura)
- Pantai Hutan Lindung (Kec. Sangkapura)
- Pantai Tinggen (Kec. Sangkapura)
- Pantai Dalegan (Kec. Panceng)
- Pulau Noko dan Pulau Gili (Kec. Sangkapura)
- Kawasan Pantai Selayar (Kec. Sangkapura)
- Air Terjun Laccar (Kec. Tambak)

B. Wisata Budaya/Religi

- Makam Maulana Malik Ibrahim (Kec. Gresik);
- Makam Sunan Giri (Kec. Kebomas);
- Makam Puspongoro (Kec. Gresik);
- Makam Raden Santri (Kec. Gresik);
- Makam Nyai Ageng Pinatih (Kec. Gresik);
- Makam Sunan Prapen (Kec. Kebomas)
- Makam Siti Fatimah Binti Maimun (Kec. Manyar)
- Makam Kanjeng Sepuh (Kec. Sidayu)

C. Wisata Minat Khusus

- Kampung Kemasan (Kec. Gresik)
- Kampung Adenium (Kec. Kedamean)

- Sentra Industri Songkok dan Rebana
- Benteng Lodewijk (Kec. Bungah)
- Sentra Makanan Khas Gresik

2.1.1.7 Wilayah Rawan Bencana

Bencana yang terjadi di Kabupaten Gresik merupakan bencana dalam skala kecil atau lokal yang meliputi bencana banjir, kekeringan, kebakaran, angin puting beliung dan tanah longsor.

a. Bencana Banjir

Bencana banjir merupakan bencana yang terjadi hamper setiap tahun di Kabupaten Gresik yang disebabkan luapan sungai Bengawan Solo dan Kali Lamong. Data banjir yang terjadi di Kabupaten Gresik Tahun 2011 s/d 2015 sebagai berikut:

Tabel 2.10
Bencana Banjir Kabupaten Gresik Tahun 2011-2015

Tahun 1	Lokasi Banjir 2	Dampak 3
2011	Balongpanggung, Cerme, Benjeng, Kedamean, Lundo Kec. Benjeng	Rumah dan Lahan Persawahan
2012	Ds.Lundo dan Delik Sumber Kec. Benjeng, Desa Tirem Kec. Dukun	Sawah = 115 Ha, Jalan Desa = 1500 m, 100 Rumah
2013	Desa Wotansari, Desa Kedungpring, Desa Pucung, Desa Sekarputih, Desa Wahas, Desa Dapet, Desa Bl.Panggung, Desa Jombang Delik, Desa Banjaragung, Desa Brangkal, Desa Karangsemanding, Desa Ngasin, Kec. Bl. Panggang Desa Lundo, Desa Balungtungjung, Desa Balungmojo Desa Sedapurklagen, Desa Deliksumber, Desa Kedungrukem, Desa Munggugianti, Desa Bengkelor, Desa Gluranploso, Desa Bulurejo, Desa Dermo, Desa Kedungsekar, Desa Klampok, Desa Sirnobojo, Desa Kalipadang, Desa Karang Kidul, Desa munggebang, Desa Banter, Kec. Benjeng, Desa Gadingwatu, Desa Pranti, Desa Boteng, Desa Boboh, Desa Beton, Desa Hendrosari, Desa Sidowungu, Desa Kapatihan, Desa Setro, Desa Laban, Desa Mojtengah, Desa Menganti, Desa Bringkang, Desa Putatlor, Kec. Menganti, Desa Cermen, Desa Glindah. Kedamean, Desa Morowudi, Desa Sukoanyar, Desa Ngembung, Desa Guranganyar Desa Dadapkuning, Desa Dampaan, Desa Lengkong, Desa Dooro, Desa Dungus, Desa	Rumah = 13.618 Jalan Desa = 76.787 m Jalan Raya = 20.420 m Sawah = 5.196 Ha Tambak = 1.871 Ha Kerugian Rp. 1.477.300.000,-

	Iker-Iker Geger, Desa Betiting, Desa Cerme Kidul, Desa Cerme Lor, Desa Tambak Beras Kec. Cerme Desa Morobakung, Desa Pejanganan, Desa Ngampel, Kec. Manyar, Desa Randuboto Kec. Sidayu, Desa Ngawen, Desa Srowo, Desa Sedagaran, Desa Mriyunan, Desa Mojoasem, Desa Racikulon, Kec. Manyar, Desa Bungah, Desa Sukorejo Desa Sukowati, Desa Melirang, Desa Mojopurogede, Desa Mojopurowetan Desa Bedaten, Desa Indrodelik, Desa Masangan, Desa Sidorejo, Desa Sungonlegowo, Desa Sidomukti Kec. Bungah, Desa Teremenggal, Desa Madumulyorejo, Desa Jrebeg, Desa Sekargadung, Desa Dukuanyar, Desa Gedong, Desa Kalirejo, Desa Karangcangkring, Desa Bangeran, Desa Bulangan	
2014	Banjaragung; Wotansari; Sekarputih; Kedungpring; Pucung; Karangsemanding; Balongpanggung (balongpanggung)	6064 Rumah; Sawah = 2172 Ha; Jalan Desa = 34.850 m; Jalan Raya = 10.660 m
	Lundo; Balongmojo; Bulangkulon; Munggugianti; Kedungrukem; Deliksumber; Sedapurklagen; Gluranploso; Bengkelolor; Bulurejo; Dermo; Klampok; Kedungsekar;	
	Kalipadang; Karangankidul; Munggugebang; Banter (Benjeng)	
	Boboh; (Menganti)	
	Dadapkuning; Ngembung; Sukoanyar; Dampaan; Dooro; Guranganyar; Morowudi; Iker-iker Geger; Dungus; Lengkong; Pandu; Cerme Kidul (Cerme)	
2015	Kecamatan balongpanggung Desa Wotansari, Dapet, Kedungpring, Brangkal, Balongpanggung, Karangsemanding, dan Banjaragung	Rumah = 6.335 Jumlah Jiwa = 18.600 Sawah(Ha) = 3.361 Tambak (Ha) = 850
	Kecamatan Benjeng pada desa Lundo, Bulangkulon, Munggugianti, Kedungrukem, Deliksumber, Sedapurklagen, Gluranploso, Bulurejo, Dermo, Klampok, Sirnobojo, Kalipadang, Balungtunjung, Balungmojo, dan Munggugebang	
	Kec. Kedamean pada desa Cermen, Glindah, Tulung, Lampah, dan Turirejo	
	Kec. Menganti pada Desa Boboh, Gadingwatu, Putatlor, Pranti, Beton, Beringkang, Kepatihan, dan Hendrosari	
	Kecamatan Cerme pada desa Dadapkuning, Ngembung, Sukoanyar, Dampaan, Dooro, Guranganyar, Morowudi, Iker-iker Geger, Dungus, Lengkong, Pandu, Cerme Kidul, Kandangan, Betiting, Gedang Kulud, Tambakberas, Padeg, dan Jono	

Sumber : LKPJ Kabupaten Gresik Tahun 2011-2015

b. Bencana Kekeringan

Bencana kekeringan di Kabupaten Gresik terjadi pada musim kemarau. Dalam rangka mengantisipasi dan menangani bencana kekeringan Pemerintah Kabupaten Gresik menetapkan lokasi darurat kekeringan. Adapun desa yang ditetapkan dalam status keadaan darurat bencana kekeringan kategori kering kritis di Kabupaten Gresik tahun 2012 s/d tahun 2015 dapat dilihat sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2.11.

Daftar Desa Yang Ditetapkan Dalam Status Keadaan Darurat Bencana Kekeringan Kategori Kering Kritis di Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2012-2015

Tahun	Kecamatan	Desa
1	2	
2012	Driyorejo	Wedoroanom, Mojosarirejo
	Wringinanom	Kesamben Kulon, Sembungan, Cermen, Katimoho
	Kedamean	Tulung, Glindah, Lampah, Turirejo
	Menganti	Pranti Beton
	Benjeng	Lundo, Balongtanjung, Balongmojo, Bulangkulon, Bengkelolor, Gluranploso, Munggugianti, Bulurejo, Kedungrukem, Sedapurklagen, Sirnobojo, Kalipadang, Karangankidul, Deliksumber, Dermo, Klampok, Kedungsekar, Metatu, Banter, Jogodalu, Jatirambe, Munggebang, Pundutate
	Balonggang	Brangkal, Dampet, Wotansari, Karangsemanding, Sekarputih, Banjaragung, Pucung, Balongpanggang, Kedungpring
	Cerme	Dooro, Worowudi, Dampaan, Dadapkuning, Pandu, Lengkonng, Jono, Kandangan, Dungus, Gedangkulut, Kambingan, SukoAnyar
	Kebomas	Kedanyang, Kembangan, Gulomantung
	Duduk Sqmpeyan	Pandanang, Glanggang, Kemudi, Sumari, Kandangan, Tambakrejo, Kawisto Windu, Setrohadi, Wadak Lor, Kramat, Panjunan, Wadak Kidul, Gredek
	Bungah	Pegundan, Kemangi, Gumeng,
	Sidayu	Ngawen, Mojoasem, Randuboto, Sidumulyo, Mriyun, Bunderan, Racikulon, Purwodadi, Asempapak, Srowo, Racitengah, Sedagaran
	Dukun	Karancangkring, Bangeran, Gedonggedo'an, Tebuwung, Baron, Babaksari, Padang Bandung, Kalirejo, Jrebeng, Sekargadung, Madumulyorejo, Babakbawo, Dukuhkembar, Tiremenggal, Bulangan
2014	Benjeng	Gluranploso, Munggugianti, Bulurejo, Kedungrukem, Deliksumber, Kalipadang, Karangankidul, Dermo, Klampok, Sirnobojo,

		Metatu, Banter, Jogodalu, Jatirembe, Pundutrate, Munggugebang
	Cerme	Dooro, Dampaan, Pandu, Lengkong, Jono, Kandangan, Dungus, Gedangkulud, Wedani
	Duduksampeyan	Petis benem, Sumari, Tambakrejo, Setrohadi, Kramat
	Kedamean	Cermen, Tulung, Lampah, Turirejo
	Balongpanggung	Kedungpring, Balongpanggung, Pacuh, Pucung
	Sidayu	Pengulu, Mojoasem, Randuboto, Racikulon, Srowo
	Bungah	Pegundan, Gumeng
2015	Benjeng	Gluranploso, Munggugianti, Bulurejo, Kedungrukem, Deliksumber, Kalipadang, Klampok, Sirnobojo, Metatu, Banter, Jogodalu, Jatirembe, Pundutrate
	Cerme	Dampaan, Pandu, Lengkong, Jono, Kandangan, Dungus, Gedangkulud, Wedani
	Duduksampeyan	Betis Benen, Sumari, Tambakrejo, Setrohadi, Kramat Wadak Kidul
	Kedamean	Tulung, Lampah, Turirejo
	Balongpanggung	Kedungpring, Balongpanggung Pucung
	Sidayu	Pengulu, Mojoasem, Randuboto
	Bungah	Penggun dan Gumeng

Sumber Data : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016

Upaya penanganan Bencana Kekeringan di Kabupaten Gresik dilakukan dengan tindakan pembuatan sumur bor, pipanisani, dan pendistribusian bantuan air bersih.

c. Kebakaran

Bencana Kebakaran di Kabupaten Gresik merupakan bencana lokal. Data terjadinya kebakaran di Kabupaten Gresik tahun 2011 s/d tahun 2015 sebagai berikut:

Tabel 2.12
Bencana Kebakaran Kabupaten Gresik Tahun 2011-2015

Tahun	Lokasi kebakaran	Kecamatan	Kerusakan/ Kerugian
1	2	3	4
2011	Ds. Wedani	Crème	1.100.500.000
	Tlogopatut	Gresik	
	Dsn Bandung sekaran sidokumpul	Gresik	
2012	Kel. Indro	Kebomas	1 (150.000.000)
	Tebuwung	Dukun	1 (75.000.000)
	Ds Klotok	Balongpanggung	1 (75.000.000)
	Mariyunan	Sidayu	1 (50.000.000)
	Roomo	Manyar	1 (250.000.000)

	Tebalo	Manyar	1 (650.000.000)
	Kel. Sidomoro	Kebomas	1 (100.000.000)
	Bulanga	Dukun	1 (100.000.000)
	Ds. Tebaloan	Duduksampean	1 (50.000.000)
	Balongpanggung	Balongpanggung	1 (700.000.000)
	Karangpoo	Gresik	1 (150.000.000)
	Dsn. Bidoyo Ds Beton	Menganti	1 (65.000.000)
	Ds Ketanen	Panceng	1 (300.000.000)
	Dsn sawaan Ds. Gedang kulud	Cerme	1 (200.000.000)
	Kel Indro	Kebomas	1 (150.000.000)
	Dsn sawaan Ds. Gedang kulud	Cerme	1 (200.000.000)
2013	Kel. Indro	Kebomas	3
	Ds Gedangkulud	Cerme	1
	ds Kalipadang	Benjeng	1
	Ds Kesamben kulon	Benjeng	1
	Ds Wonokerto	Dukun	1
	Ds Diponggo	Tambak	1
	Cerme kidul	Cerme	1
	Ds Dadapkuning	Cerme	1
	Ds lowayu	dukun	1
	Ds Puloancian	Gresik	1
	Ds Turirejo	Kedamean	1
	Ds Kalirejo	Dukun	1
	Ds Klotok	Balongpanggung	1
	Ds Klotok	Balongpanggung	1
	Randuagung	Kebomas	1
	Ds Tumapel	Duduksampeyan	1
	Kel Pekelingan	Gresik	2
	Ds Turirejo	Kedamean	1
	Ds Menganti	Menganti	1
Ds Deliksumber	Benjeng	1	
2014	Ds Gadung	driyorejo	1 (150.000.000)
	Ds Sembung	Wringinanom	3 (1.014.500.000)
	Ds Sekarkurung	Kebomas	3 (150.000.000)
	Ds Watuagung	Bunga	1 (100.000.000)
	Kel Kroman	Gresik	6 (733.000.000)
	Ds Sumpu	Driyorejo	2 (150.000.000)
	Ds Bulurejo	Benjeng	2 (1000.000.000)
	ds Serah	Panceng	1 (60.000.000)
	Ds Sekarputih	Balongpanggung	1 (31.518.000)
	Ds Bangeran	Dukun	1 (155.000.000)
	Ds Panggakakulon	Ujungpangkah	1 (10.000.000)
	Ds Sidorukun	Gresik	1 (52.500.500)
	2015	Pacuh	Balongpanggung
sidogedung batu		Sangkapura	200000000
Watestanjung		Wringinanom	50000000

Jombang Delik	Balongpanggung	70200000
Kalipadang	Benjeng	150000000
Kedungpring	Balongpanggung	55000000
Tlogobedah	Menganti	50000000
Karangandong	Driyorejo	200000000
Setro	Menganti	215000000
Bedanten	Bungah	750000000
Tanjungan	Driyorejo	40000000
Radegansari	Driyorejo	250000000
Mojopuro Gede	Bungah	300000000
Pangkah wetan	Ujung Pangkah	200000000
Menganti	Menganti	50000000
Mojowuku	Kedamean	175000000
Lampah	Kedamean	10500000
Wringinanom	Wringinanom	-
Gunung Teguh	Sangkapura	50000000
Krikilan	Driyorejo	-

Sumber : BPBD Tahun 2011-2015

d. Angin Puting Beliung

Bencana puting beliung di Kabupaten Gresik dengan status bencana lokal kabupaten selama tahun 2011 s/d 2015 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.13
Bencana Angin Puting Beliung Kabupaten Gresik
Tahun 2011-2015

Tahun	Tempat Kejadian	Kecamatan	Kerusakan / Kerugian
1	2	3	4
2011	Desa Campurejo	Panceng	40 rumah, 1 Kantor Kec sidayu, 1 sekolah sidayu
	Ds. Lengkong	Cerme	
	Ds. Dungus	Cerme	
	Ds. Jombangdelik	Balongpanggung	
	Ds. Kramat	Bunga	
	Ds. Ngabetan	Cerme Lor	
	Ds Raci tengah	Sidayu	
	Ds. Lundo	Benjeng	
2012	Brangkal	Balongpa nggang	20 Rmh (50.000.000)
	Dsn. Dukuh	Balongpa nggang	
	Tanjung	Balongpa nggang	
	Ds Padeng	Crème	1(15.000.000)
2013	Desa Tanjungori	Tambak	1
	Desa Kedungrukem	Benjeng	16
	Desa Pacuh	Balongpa nggang	56
	Desa Mriyunan	Sidayu	1 Gedung Sekolah
	Desa Sukalela	Tambak	1
	Desa Lebaniwaras	Wringinanom	68
	Desa Wringinanom	Wringinanom	69
	Desa Mulyorejo	Dukun	1

	Dusun Sukoanyar	Cerme	1
	Dusun Pendem	Kedamean	71
	Desa Turirejo	Kedamean	11
	Desa Karangrejo	Ujungpang kah	10
	Desa Turirejo	Kedamean	1
	Desa Cerme Kidul	Cerme	1
	Desa Sumberwaru	Wringinanom	1
	Desa Turirejo	Kedamean	1
	Desa Kramat	Bungah	43
	Desa Dapet	Balongpa nggang	1
	Desa Kandangan	Duduksam peyan	2
	Desa tambakrejo	Duduksam peyan	3
	Desa Sumengko	Duduksam eyan	1
2014	Dsn Dapet	Balongpa nggang	1 (75.000.000)
	Dsn Jambu	Cerme	1 (30.000.000)
	Dsn Kemendung	Cerme	1 (30.000.000)
	Kelurahan Lumpur	Gresik	1 (40.000.000)
	Desa Pangkahkulon	Ujungpang kah	1 (25.000.000)
	Desa Dahanrejo	Kebomas	1 (10.000.000)
	Desa Dooro	Cerme	47 (186.400.000)
	Desa Sedapurklagen	Benjeng	1 (17.000.000)
	Desa Kalipadang	Benjeng	1 (50.000.000)
2015	Wedoroanom	Driyorejo	35.000.000,00
	Banyuurip	Kedamean	51.450.000,00
	Kesamben wetan	Driyorejo	50.000.000,00
	Kelurahan Sidomoro	Kebomas	60.000.000,00
	SMAN 1 Balongpanggang	Balongpanggang	30.000.000,00
	Mojowuku	Kedamean	22.500.000,00
	Tambak rejo	Duduk sampeyan	50.000.000,00

Sumber : BPBD Tahun 2011-2015

Penanganan Bencana Angin puting Beliung di Kab Gresik antara lain:

1. Pendirian Posko Siaga Bencana;
2. Menyiapkan peralatan pemotongan untuk pohon tumbang;
3. Koordinasi dengan Dinas dan Instansi Terkait (Dinas PU, BLH, PLN dan Telkom);
4. Survey lokasi saat terjadi Pasca Bencana;
5. Menindaklanjuti Proposal ganti rugi rumah yang tertimpa;
6. Pemberian paket sembako;
7. Memberikan paket kebutuhan pokok.

e. Tanah Longsor

Bencana Tanah longsor di Kabupaten Gresik dengan status bencana lokal kabupaten selama tahun 2011 s/d 2015 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.14
Bencana Tanah Longsor Kabupaten Gresik Tahun 2011-2015

Tahun	Tempat Kejadian	Kerusakan / Kerugian
1	2	3
2011	Tidak ada laporan kejadian	
2012	Desa Jono Desa Pandu, Kec. Cerme, Desa Tirem Enggal, Kec. Dukun.	Rp82.000.000
2013	Tidak ada laporan kejadian	
2014	Teluk Jati Dawang Kotakusuma; (Tambak) Sawahmulya; Gunungteguh; Daun; Balikterus ; Lebak (Sangkapura)	572 Rumah; Jalan Desa = 259 m; Jalan Raya = 600 m; Tanggul Jebol = 44; Jembatan = 4
2015	Kecamatan Kedamean	1 rumah

Sumber : BPBD Tahun 2011-2015

2.1.1.8 Demografi

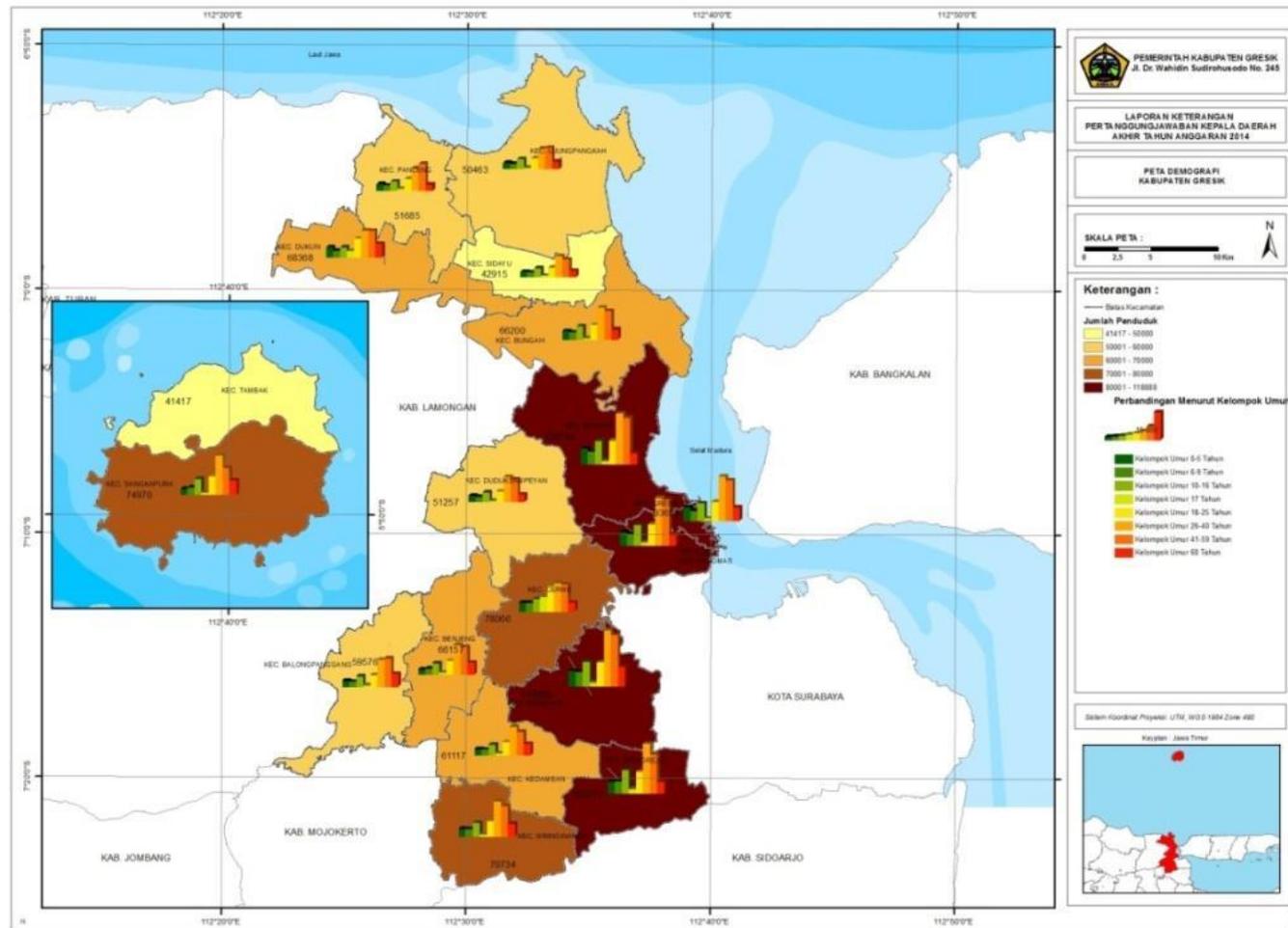
Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik jumlah penduduk Kabupaten Gresik pada akhir tahun 2015 sebanyak 1,303,773 jiwa yang terdiri dari 655,460 laki-laki dan 648,313 perempuan. Kepadatan penduduk Kabupaten Gresik pada tahun 2015 sebesar 1,094.46 jiwa/Km². Sedangkan angka rasio jenis kelamin laki-laki dibanding perempuan pada tahun 2015 sebesar 1:1,011.

Pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2013, jumlah penduduk mengalami peningkatan sebanyak 54.426 jiwa dengan laju pertumbuhan rata-rata mencapai 2.12%. Sedangkan pada tahun 2014 dan tahun 2015, jumlah penduduk menurun hal ini disebabkan pemutakhiran identitas penduduk pada pelayanan administrasi publik (administrasi kependudukan dan pencatatan sipil) melalui perekamaan e-KTP yang didukung pengalihan Sistem Informasi Kependudukan (SIMDUK) ke Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK). Melalui perubahan ini, ketunggalan identitas berusaha untuk diwujudkan. Adapun rincian jumlah penduduk Kabupaten Gresik dapat diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 2.15.
Jumlah Penduduk Kabupaten Gresik Tahun 2011-2015

NO	KECAMATAN	Luas Wilayah	Tahun 2011			Tahun 2012			Tahun 2013			Tahun 2014			Tahun 2015		
			L	P	Total												
1	DUKUN	59,03	33.573	33.027	66.600	34.482	33.886	68.368	34.805	34.142	68.947	34.680	34.025	68.705	33,826	33,317	67,143
2	BALONGPANGGANG	63,88	28.828	28.729	57.557	29.768	29.808	59.576	29.839	29.857	59.696	29.430	29.560	58.990	29,22	29,366	58,586
3	PANCENG	62,59	25.672	25.355	51.027	26.017	25.668	51.685	26.426	26.000	52.426	26.477	26.075	52.552	26,213	25,823	52,036
4	BENJENG	61,26	32.165	31.964	64.129	33.189	32.968	66.157	33.466	33.234	66.700	33.196	33.045	66.241	33,105	33,048	66,153
5	DUDUKSAMPEYAN	74,29	25.238	25.132	50.370	25.629	25.628	51.257	25.892	25.943	51.835	25.752	25.794	51.546	25,459	25,51	50,969
6	WRINGINANOM	62,62	34.494	33.846	68.340	35.711	35.023	70.734	36.647	35.946	72.593	36.355	35.818	72.173	36,382	35,968	72,35
7	UJUNGPAKKAH	94,82	24.363	24.409	48.772	25.306	25.157	50.463	25.559	25.414	50.973	25.636	25.430	51.066	25,538	25,378	50,916
8	KEDAMEAN	65,96	29.823	29.625	59.448	30.710	30.407	61.117	31.294	30.955	62.249	31.453	31.113	62.566	31,578	31,297	62,875
9	SIDAYU	47,13	21.047	20.782	41.829	21.613	21.302	42.915	21.928	21.530	43.458	22.052	21.705	43.757	21,946	21,622	43,568
10	MANYAR	95,42	53.233	51.261	104.494	55.310	53.474	108.784	56.018	54.121	110.139	56.434	54.607	111.041	56,475	54,73	111,205
11	CERME	71,73	37.449	37.508	74.957	39.009	39.057	78.066	39.464	39.516	78.980	39.463	39.457	78.920	39,232	39,251	78,483
12	BUNGAH	79,49	32.376	32.326	64.702	33.138	33.062	66.200	33.699	33.448	67.147	33.926	33.501	67.427	33,688	33,372	67,06
13	MENGANTI	68,71	57.970	56.874	114.844	60.023	58.865	118.888	61.064	59.817	120.881	61.223	60.043	121.266	61,035	59,898	120,933
14	KEBOMAS	30,06	49.634	48.005	97.639	51.572	49.954	101.526	52.220	50.631	102.851	52.522	51.133	103.655	52,371	51,321	103,692
15	DRIYOREJO	51,3	50.031	49.405	99.436	51.427	50.786	102.213	52.306	51.428	103.734	52.252	51.371	103.623	51,948	51,161	103,109
16	GRESIK	5,54	46.137	45.146	91.283	47.169	46.490	93.659	46.939	46.388	93.327	45.734	45.390	91.124	43,305	43,629	86,934
17	SANGKAPURA	118,72	37.239	37.104	74.343	37.646	37.324	74.970	38.586	38.154	76.740	36.941	36.749	73.690	34,855	34,796	69,651
18	TAMBAK	78,7	20.625	19.956	40.581	21.067	20.350	41.417	21.416	20.685	42.101	20.762	20.210	40.972	19,284	18,826	38,11
	JUMLAH	1.191,25	639.897	630.454	1.270.351	658.786	649.209	1.307.995	667.568	657.209	1.324.777	664.288	655.026	1.319.314	655,46	648,313	1.303,773

Sumber data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik Tahun 2016



Sumber data: Bappeda Kabupaten Gresik Tahun 2016

Gambar 2.7

Peta Demografi Kabupaten Gresik

Sebaran penduduk berdasarkan peta demografi diketahui bahwa kepadatan penduduk dengan gradasi warna coklat tua berada di wilayah perkotaan yaitu Kecamatan Gresik, Kebomas, Manyar, Driyorejo, dan Menganti. Adapun jumlah keluarga di Kabupaten Gresik pada Tahun 2015 sebanyak 366,554 keluarga. Dibandingkan dengan tahun 2014 yang tercatat sebanyak 364.374 keluarga maka terjadi kenaikan jumlah keluarga sebanyak 2.180 Keluarga atau 0,58%. Adapun rincian jumlah keluarga di Kabupaten Gresik sebagaimana tabel berikut:

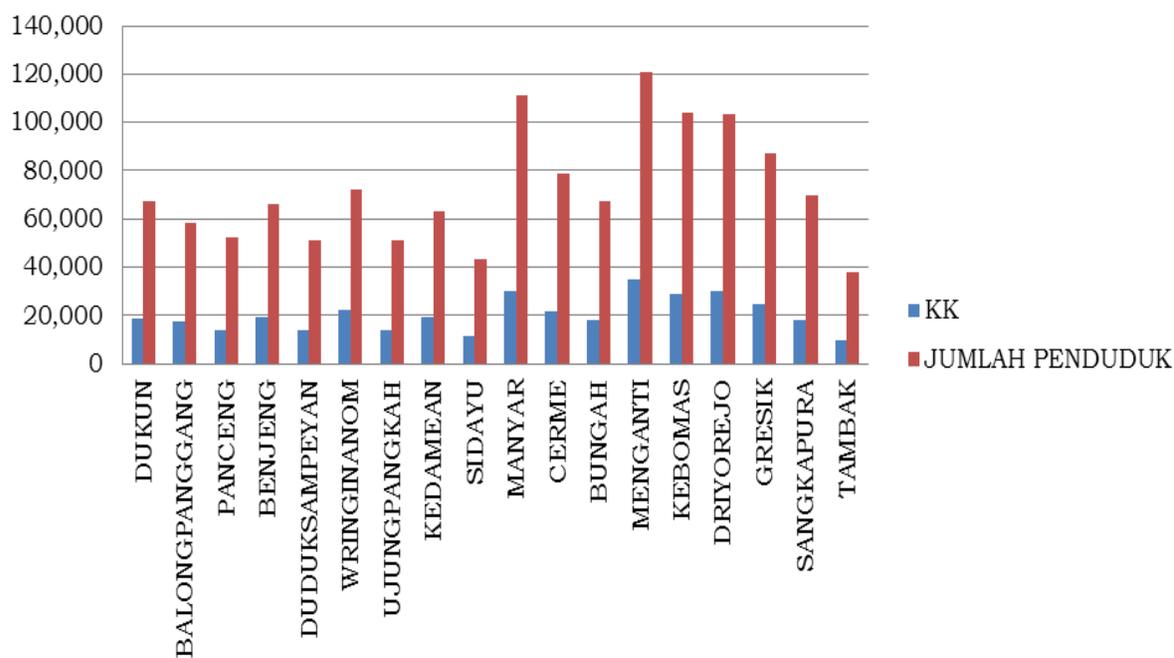
Tabel 2.16

Jumlah Keluarga di Kabupaten Gresik Tahun 2011-2015

N O	KECAMATAN	JUMLAH DESA / KELURAHAN	JUMLAH KK				
			2011	2012	2013	2014	2015
1	DUKUN	26	13.160	18.493	18.790	19.077	18.632
2	BALONGPANGGAN G	25	11.088	17.434	17.494	17.596	17.403
3	PANCENG	14	9.904	13.612	13.955	14.250	14.124
4	BENJENG	23	14.584	19.135	19.231	19.384	19.320
5	DUDUKSAMPEYAN	23	9.475	13.780	13.997	14.171	14.020
6	WRINGINANOM	16	16.122	21.224	22.013	22.415	22.485
7	UJUNGPANGKAH	13	9.893	13.354	13.751	13.987	14.103
8	KEDAMEAN	15	12.866	18.225	18.692	19.077	19.159
9	SIDAYU	21	8.114	10.930	11.216	11.476	11.520
10	MANYAR	23	23.135	28.414	29.187	29.958	30.237
11	CERME	25	15.403	20.630	21.054	21.460	21.488
12	BUNGAH	22	11.832	17.541	17.900	18.348	18.346
13	MENGANTI	22	27.306	33.406	34.148	34.862	34.775
14	KEBOMAS	21	21.378	27.133	27.755	28.603	28.839
15	DRIYOREJO	16	23.842	28.680	29.220	29.796	29.787
16	GRESIK	21	20.419	25.235	25.449	25.578	24.478
17	SANGKAPURA	17	13.681	19.039	19.593	19.643	18.147
18	TAMBAK	13	8.062	10.420	10.659	10.682	9.691
JUMLAH		356	270.26 4	356.68 5	364.104	364.37 4	366.55 4

Sumber data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik Tahun 2016

Berdasarkan sebaran keluarga dan jumlah penduduk sebagaimana diuraikan sebelumnya, berikut digambarkan perbandingan jumlah penduduk dan kepemilikan kartu keluarga sebagaimana gambar berikut;



Gambar 2.8
Grafik Perbandingan Sebaran Keluarga dan Jumlah Penduduk
Kabupaten Gresik Tahun 2015

Berdasarkan diagram di atas dijelaskan bahwa pada tahun 2015, jumlah Keluarga terbanyak di Kecamatan menganti dengan 34.775 KK selaras dengan jumlah penduduk terbanyak 120.933 jiwa. Sedangkan persebaran keluarga terendah berada pada Kecamatan Tambak dengan 9.691 KK dengan jumlah penduduk sebanyak 38.110 jiwa.

Adapun sebaran kelompok usia penduduk Kabupaten Gresik Tahun 2015 sebagaimana pada tabel berikut :

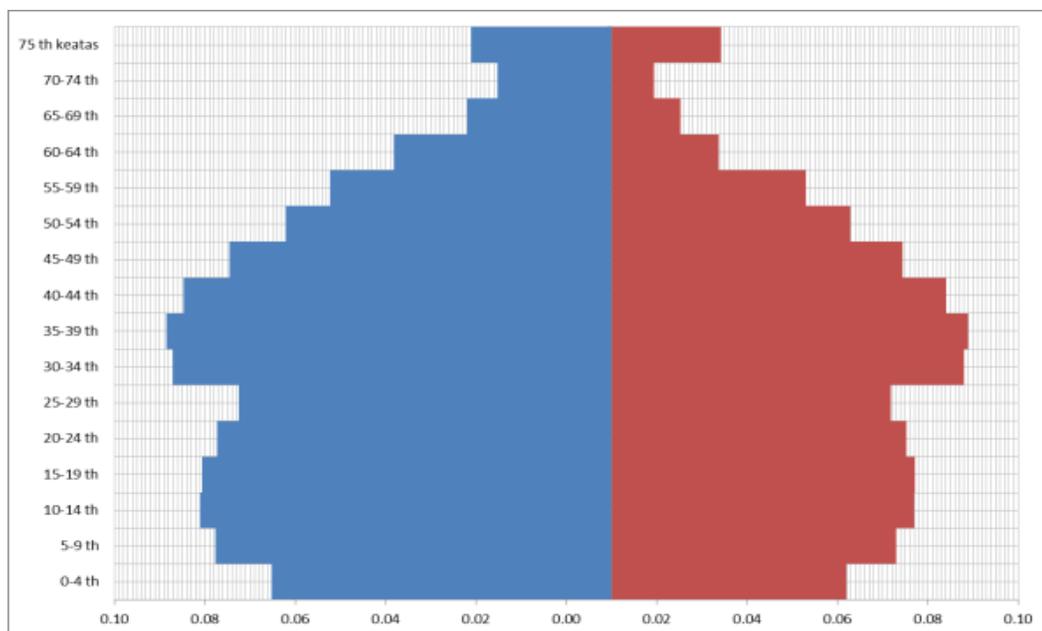
Tabel 2.17

Jumlah Penduduk berdasarkan Kelompok Umur Kabupaten Gresik Tahun 2012-2015

Kelompok Umur	Tahun 2012			Tahun 2013			Tahun 2014			Tahun 2015		
	Laki-Laki	Perempuan	Total									
0-4 th	27.822	25.897	53.719	40.052	37.543	77.595	40.817	38.082	78.899	42.766	40.170	82.936
5-9 th	49.900	46.773	96.673	51.117	47.961	99.078	50.562	47.351	97.913	50.835	47.302	98.137
10-14 th	55.351	51.901	107.252	55.544	52.062	107.606	55.375	51.989	107.364	53.183	49.965	103.148
15-19 th	54.453	51.850	106.303	54.371	51.901	106.272	53.808	50.886	104.694	52.829	50.015	102.844
20-24 th	50.423	48.559	98.982	50.104	48.098	98.202	50.375	48.214	98.589	50.693	48.785	99.478
25-29 th	53.351	52.933	106.284	53.105	52.467	105.572	49.897	48.899	98.796	47.525	46.567	94.092
30-34 th	62.184	62.321	124.505	61.636	61.813	123.449	59.285	59.420	118.705	57.039	57.074	114.113
35-39 th	62.193	60.404	122.597	61.702	59.985	121.687	59.817	59.261	119.078	57.983	57.590	115.573
40-44 th	59.707	57.021	116.728	59.404	56.783	116.187	57.575	55.730	113.305	55.522	54.494	110.016
45-49 th	49.460	47.866	97.326	49.120	47.506	96.626	50.804	49.629	100.433	48.849	48.274	97.123
50-54 th	40.943	40.615	81.558	40.461	40.231	80.692	40.728	40.657	81.385	40.726	40.768	81.494
55-59 th	33.139	30.276	63.415	32.442	29.765	62.207	33.429	31.804	65.233	34.248	34.349	68.597
60-64 th	22.466	20.736	43.202	21.920	20.355	42.275	24.566	21.990	46.556	25.063	21.893	46.956
65-69 th	13.164	15.809	28.973	12.602	15.453	28.055	13.422	16.087	29.509	14.360	16.381	30.741
70-74 th	11.103	14.742	25.845	10.738	14.321	25.059	10.664	13.910	24.574	9.966	12.573	22.539
75 th keatas	13.127	21.506	34.633	12.167	19.981	32.148	13.164	21.117	34.281	13.776	22.210	35.986
JUMLAH	658.786	649.209	1.307.995	666.485	656.225	1.322.710	664.288	655.026	1.319.314	655.363	648.410	1.303.773

Sumber data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik Tahun 2016

Sebagaimana dijelaskan pada tabel struktur penduduk Kabupaten Gresik Tahun 2015 didominasi oleh kelompok umur usia produktif, yaitu 15-64 tahun, yaitu sebesar 930.286 jiwa, yaitu 69.54% dari jumlah penduduk Kabupaten Gresik. Sedangkan kelompok umur non produktif, yaitu 0-14 tahun dan 65 tahun keatas berjumlah 373.487 jiwa atau 27.91%. Rasio ketergantungan antara usia produktif dan usia tidak produktif pada Tahun 2015 sebesar 40.14, yang berarti setiap 100 usia produktif harus menanggung 40 usia tidak produktif.



Sumber data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik Tahun 2016

Gambar 2.9
Piramida Penduduk Kabupaten Gresik Tahun 2015

Piramida Penduduk Kabupaten Gresik Tahun 2015 menunjukkan piramida berbentuk kubah yang melebar ditengah. Piramida ini memberikan gambaran struktur usia, dimana penduduk usia produktif jauh lebih besar daripada usia tidak produktif.

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Kondisi Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Gresik dapat dielaborasi kedalam tiga fokus utama, yaitu Fokus Kesejahteraan Masyarakat dan Pemerataan Ekonomi, Fokus Kesejahteraan Masyarakat, dan Fokus Seni Budaya dan Olah Raga. Identifikasi terhadap ke tiga fokus utama tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Perkembangan ekonomi makro dalam kerangka ekonomi daerah ditunjukkan pada pertumbuhan ekonomi, Laju Inflasi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), tingkat pengangguran terbuka hingga capaian pengentasan kemiskinan di Kabupaten Gresik.

Ekonomi Kabupaten Gresik mengalami pertumbuhan sebesar 6,15% pada tahun 2015. Kondisi ini melambat 0,88 poin dibandingkan pada periode yang sama pada tahun sebelumnya yang mencapai sebesar 7,03%. Ditinjau berdasarkan posisi relatif Gresik terhadap Jawa Timur, pertumbuhan ekonomi Gresik di atas ekonomi Jawa Timur yang mengalami pertumbuhan 5,44% pada tahun 2015 atau melambat 0,42 poin dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya sebesar 5,86%. Kondisi ini selaras bila ditinjau dari posisi relatif Gresik terhadap nasional pada tahun tahun 2015 yang tumbuh 4,79 persen atau melambat bila dibanding tahun 2014 yang mencapai 5,02 persen. Posisi relatif perbandingan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Gresik dengan daerah sekitar, Provinsi Jawa Timur dan Nasional dapat dilihat pada grafik berikut:



Sumber data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik Tahun 2015

Gambar 2.10

Posisi Relatif Pertumbuhan Ekonomi Gresik dengan Provinsi Jawa Timur, dan Nasional

Ditinjau dari posisi relatif dibandingkan dengan Kabupaten Kota Lainnya, pada tahun 2014 Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gresik tumbuh lebih tinggi dibandingkan kota-kota sekitar meskipun pada tahun tersebut seluruh kota mengalami perlambatan dengan penurunan pertumbuhan ekonomi terbesar pada kota Surabaya sebanyak 0,71%

sedangkan Gresik hanya melambat 0,11% year on year. Adapun Posisi Relatif Pertumbuhan Ekonomi Daerah sekitar Kabupaten Gresik disajikan sebagai berikut;

Tabel 2.18
Posisi Relatif Pertumbuhan Ekonomi Daerah sekitar Kabupaten Gresik

Kabupaten/Kota	2011	2012	2013	2014
Mojokerto	6.61	7.26	6.48	6.36
Sidoarjo	7.04	7.26	6.88	6.18
Lamongan	6.67	6.92	6.86	6.41
Surabaya	7.13	7.35	7.58	6.73
Gresik	6.48	6.92	7.14	7.03

Sumber: BPS Jawa Timur Tahun 2015

Selama tahun 2011-2014, tingkat inflasi Kabupaten Gresik menunjukkan fluktuasi yang tinggi yang disebabkan oleh pelbagai faktor baik di tingkat lokal, regional, maupun nasional seperti kenaikan tarif dasar listrik, tarif angkutan, kenaikan harga BBM, kerusakan infrastruktur yang menghambat distribusi, hingga terjadinya force major seperti bencana alam. Pengendalian tingkat inflasi merupakan upaya dalam menciptakan ketidakpastian nilai uang, tingkat produksi, distribusi dan arah pengembangan ekonomi serta daya beli dan permintaan masyarakat akan barang dan jasa yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Sedangkan laju inflasi Kabupaten Gresik pada Tahun 2015 mengalami penurunan menjadi 5%.

Data inflasi Kabupaten Gresik Tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 dapat disajikan dalam gambar berikut:



Sumber: BPS Kabupaten Gresik Tahun 2015

Gambar 2.11

Laju Inflasi Kab. Gresik Tahun 2011-2015

Ditinjau dari kerangka ekonomi makro berdasarkan data termutakhir, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Gresik Tahun 2014 Atas Dasar Harga Konstan 2010 mencapai Rp76,340,445.19 atau mengalami peningkatan 7,06% dibandingkan dengan periode sebelumnya. Hal ini selaras dengan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku yang mencapai Rp93,813,286.08 atau meningkat 12,72% dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Penyumbang terbesar Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Gresik adalah industri pengolahan dengan kontribusi mencapai 47-54%. Adapun sektor pertambangan dan penggalian dan sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor menjadi kontributor terbesar kedua dan ketiga dengan dengan valuasi yang berimbang yaitu 10,6 -11,4 Milyar Rupiah. Sedangkan sektor dengan kontribusi terkecil adalah Pengadaan air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang dengan rata-rata nilai 48 Juta Rupiah.

Adapun secara rinci PDRB Kabupaten Gresik dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.19
Produk Domestik Regional Brutto Kabupaten Gresik
Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011-2014

No.	Uraian	Satuan	2011	2012	2013*	2014**
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Juta Rp	4.763.914,97	5.535.009,41	6.305.971,72	7.254.894,30
B	Pertambangan dan Penggalian	Juta Rp	9.390.910,55	9.827.424,26	10.245.762,79	11.493.102,34
C	Industri Pengolahan	Juta Rp	32.308.521,35	36.088.595,40	39.960.124,34	45.213.679,15
D	Pengadaan Listrik dan Gas	Juta Rp	335.390,92	360.991,47	363.811,14	376.934,26
E	Pengadaan air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	Juta Rp	42.990,03	46.488,60	52.878,83	56.577,78
F	Konstruksi	Juta Rp	5.176.064,24	5.765.918,04	6.623.078,59	7.771.712,32
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Juta Rp	7.298.021,20	8.340.282,89	9.564.482,23	10.617.743,21
H	Transportasi dan Pergudangan	Juta Rp	1.421.512,92	1.589.251,34	1.794.461,81	2.045.565,11
I	Penyediaan Akodasi dan Makanan dan Minuman	Juta Rp	687.506,74	789.221,92	892.743,70	1.051.827,94
J	Informasi dan Komunikasi	Juta Rp	2.408.072,75	2.687.928,82	3.019.245,00	3.221.708,46
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	Juta Rp	653.694,58	763.654,31	888.457,38	997.535,45
L	Real Estat	Juta Rp	811.707,74	875.947,69	968.157,82	1.037.164,51
M,N	Jasa Perusahaan	Juta Rp	174.760,15	194.965,47	221.696,00	245.394,83
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan jaminan Sosial Wajib	Juta Rp	869.599,56	1.005.892,82	1.063.516,29	1.095.668,28
P	Jasa Pendidikan	Juta Rp	531.209,36	611.016,63	679.522,49	751.311,55
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	Juta Rp	230.900,22	262.153,53	292.050,94	332.793,24
R,S,T,U	Jasa Lainnya		192.825,75	201.541,64	218.772,84	249.683,35
Produk Domestik Regional Bruto			67.297.603,03	74.946.284,24	83.154.733,91	93.813.296,08
Produk Domestik Regional Bruto Tanpa Migas			58.587.475,26	65.910.866,81	73.688.679,84	83.247.833,34

Sumber data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik Tahun 2015

Catatan:

** Angka Sementara

*** Angka Sangat Sementara

Tabel 2.20
Produk Domestik Regional Brutto Kabupaten Gresik
Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011-2014

No.	Uraian	Satuan	2011	2012	2013*	2014**
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Juta Rp	4.496.278,21	4.730.239,19	4.986.147,39	5.244.109,17
B	Pertambangan dan Penggalian	Juta Rp	8.020.088,16	8.348.891,15	7.797.528,89	8.531.409,27
C	Industri Pengolahan	Juta Rp	30.365.658,19	32.380.789,26	34.834.077,53	37.263.961,91
D	Pengadaan Listrik dan Gas	Juta Rp	346.224,22	389.814,27	417.222,28	431.674,29
E	Pengadaan air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	Juta Rp	42.015,27	43.074,06	46.400,24	47.060,05
F	Konstruksi	Juta Rp	5.007.996,53	5.397.869,06	5.842.464,55	6.336.211,23
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Juta Rp	6.929.264,57	7.652.725,16	8.377.567,68	8.935.823,02
H	Transportasi dan Pergudangan	Juta Rp	1.345.227,90	1.433.700,45	1.528.906,37	1.619.184,73
I	Penyediaan Akodasi dan Makanan dan Minuman	Juta Rp	658.311,25	712.587,65	765.685,76	835.346,00
J	Informasi dan Komunikasi	Juta Rp	2.366.047,15	2.619.147,44	2.938.569,22	3.131.927,07
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	Juta Rp	623.310,89	687.098,10	768.801,85	811.255,13
L	Real Estat	Juta Rp	784.318,27	836.475,44	891.850,11	948.999,87
M,N	Jasa Perusahaan	Juta Rp	165.577,05	172.811,11	183.423,44	199.106,15
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan jaminan Sosial Wajib	Juta Rp	837.294,96	867.898,09	883.884,78	890.043,69
P	Jasa Pendidikan	Juta Rp	504.208,71	539.815,93	576.431,64	616.608,93
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	Juta Rp	504.208,71	539.815,93	576.431,64	616.608,93
R,S,T,U	Jasa Lainnya		186.195,66	193.740,00	204.475,99	214.879,73
Produk Domestik Regional Bruto			62.898.691,41	67.248.791,50	71.304.515,32	76.340.445,19
Produk Domestik Regional Bruto Tanpa Migas			55.486.702,83	59.501.071,46	64.109.194,42	68.423.625,16

Sumberdata : Analisa Pembangunan Ekonomi Kabupaten Gresik Tahun 2015

*)Angka Sementara

**)Angka Sangat Sementara

Berdasarkan data di atas, maka diperoleh Pendapatan perkapita Kabupaten Gresik sebagaimana berikut;

Tabel 2.21

Pendapatan Per Kapita Kabupaten Gresik Tahun 2009-2014

Tahun	PDRB ADHB (Juta Rp)	PDRB ADHK Tahun 2000 (Juta Rp)	Pendapatan Per Kapita (Mengacu PDRB ADHB)	Pendapatan Per Kapita (Mengacu PDRB ADHK)	Jumlah Penduduk
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
2009	32,117,667.00	15,322,529.00	26,253,286.60	12,524,781.00	1,223,377.00
2010	38,024,382.95	17,074,646.75	30,732,635.03	13,800,326.16	1,237,264.00
2011	44,082,264.57	18,081,043.89	37,450,000.00	15,270,000.00	1,270,351.00
2012	50,185,435.99	19,424,161.63	41,420,000.00	16,030,000.00	1,307,995.00
2013	57,264,224.40	20,811,653.46	46,670,000.00	16,960,000.00	1,324,777.00
2014	65,609,306.73	22,274,018.91	49,729,864.71	16,883,030.81	1,319,314.00

Struktur ekonomi Kabupaten Gresik berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku didominasi oleh industri pengolahan dengan 48,20%. Sedangkan sektor dengan persentase terendah adalah Pengadaan Air, Penelolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang dengan 0,06%. Adapun secara rinci Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Gresik dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.22

Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Gresik Tahun 2011-2014

No.	Uraian	Satuan	2011	2012	2013*	2014**
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	7,08	7,39	7,58	7,73
B	Pertambangan dan Penggalian	%	13,95	13,11	12,32	12,25
C	Industri Pengolahan	%	48,01	48,15	48,06	48,2
D	Pengadaan Listrik dan Gas	%	0,5	0,48	0,44	0,4
E	Pengadaan air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	%	0,06	0,06	0,06	0,06
F	Konstruksi	%	7,69	7,69	7,96	8,28
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	%	10,84	11,13	11,5	11,32
H	Transportasi dan Pergudangan	%	2,11	2,12	2,16	2,18
I	Penyediaan Akodasi dan Makanan dan Minuman	%	1,02	1,05	1,07	1,12
J	Informasi dan Komunikasi	%	3,58	3,59	3,63	3,43
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	%	0,97	1,02	1,07	1,06
L	Real Estat	%	1,21	1,17	1,16	1,11
M,N	Jasa Perusahaan	%	0,26	0,26	0,27	0,26
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan jaminan Sosial Wajib	%	1,29	1,34	1,28	1,17
P	Jasa Pendidikan	%	0,79	0,82	0,82	0,8
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	%	0,34	0,35	0,35	0,35
R,S, T,U	Jasa Lainnya		0,29	0,27	0,26	0,27

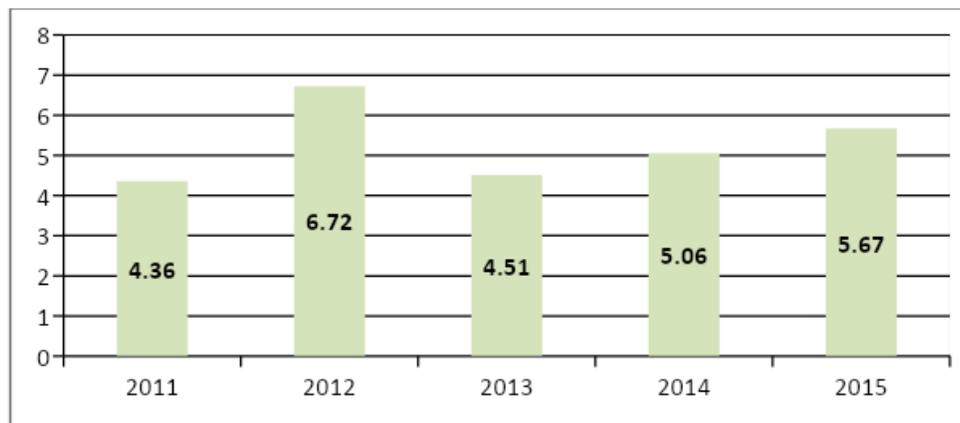
Produk Domestik Regional Bruto	100	100	100	100
--------------------------------	-----	-----	-----	-----

Sumberdata : Analisa Pembangunan Ekonomi Kabupaten Gresik Tahun 2015

*)Angka Sementaa

**)Angka Sangat Sementara

Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Gresik pada tahun 2015 pada level 5,67% dibandingkan tahun 2014 yang mencapai 5.06%. secara *trendline* Perkembangan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Gresik selama Tahun 2011-2015 mengalami fluktuasi. Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Gresik menekan angka pengangguran pada tahun 2013 hingga mencapai 4.51% dari 6.72% pada tahun 2012 ternyata tidak diiringi pada tahun berikutnya. Pengangguran meningkat tipis 0.15% atau mencapai 5,06% pada tahun 2014. Gejolak tingkat pengangguran ini disebabkan oleh pelbagai hal persaingan pencari kerja yang kompetitif antara masyarakat lokal dan masyarakat di luar Gresik, kultur budaya pencari kerja, persyaratan kompetensi yang dibutuhkan, hingga bentuk investasi.



Sumber data: BPS Provinsi Jawa Timur Tahun 2016

Gambar 2.12

Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka
Kab. Gresik Tahun 2011-2015

Pada sektor pengentasan kemiskinan, Kabupaten Gresik telah meraih progress yang positif. Hal ini ditunjukkan dengan penurunan tingkat kemiskinan secara bertahap sebagaimana pada Tabel 2.17 Perkembangan Tingkat, Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan Kabupaten Gresik.

Tabel 2.23

Perkembangan Tingkat, Kedalaman, dan Keparahan Kemiskinan Kabupaten Gresik

Tahun	P0	P1	P2	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)
2008	21.43	6.88	2.39	248,807.00
2009	19.14	3.13	0.79	225,774.00
2010	16.42	1.99	0.41	193,813.00
2011	15.33	2.65	0.61	181,700.00
2012	14.29	2.47	0.58	172,300.00
2013	13.89	2.45	0.72	171,600.00
2014	13.41	2.20	0.65	166,950.00

Sumber Data: BPS, diolah.

Tingkat Kemiskinan (P0) adalah persentase penduduk miskin yang berada di bawah garis kemiskinan. Tabel 2.17 menunjukkan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Gresik sebesar 15.33% pada Tahun 2008 telah menurun 1.92 poin menjadi 13.41% pada Tahun 2014. Adapun jumlah penduduk miskin sebanyak 181.700 jiwa pada tahun 2011 menurun 14.750 jiwa hingga menjadi 166.950 jiwa pada tahun 2014.

Selain Tingkat Kemiskinan (P0), Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Kabupaten Gresik juga mengindikasikan perubahan yang cukup baik. Indeks Kedalaman Kemiskinan adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Bila indeks kedalaman kemiskinan semakin menurun artinya rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung mendekati garis kemiskinan.. Pada Tahun 2011, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Gresik sebesar 2.65. Angka ini turun menjadi 2.20 pada Tahun 2014 dan mengindikasikan terjadinya peningkatan kesejahteraan pada masyarakat miskin di Kabupaten Gresik.

Berbeda dengan P0 dan P1, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menunjukkan perkembangan yang kurang baik. P2 atau Indeks Keparahan Kemiskinan merupakan indikator yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Bila, indeks semakin menurun maka ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin semakin berkurang. Pada Tahun 2011, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menunjukkan angka 0.61, dan meningkat 0.04 poin menjadi 0.65 pada

Tahun 2014. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah pola perubahan indikator ini yang cenderung fluktuatif.

Pada Tahun 2009 dan 2010, Tingkat Kemiskinan (PO) menunjukkan penurunan signifikan yaitu diatas 2%. Pada Tahun 2011 hingga Tahun 2014, penurunan tingkat kemiskinan tetap turun, namun menunjukkan perlambatan. Apabila digambarkan dalam kurva, laju penurunan itu akan terlihat landai, sebagaimana pada Gambar 2.13 Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Gresik Tahun 2011-2014.



Sumber data: BPS, diolah

Gambar 2.13

Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kab. Gresik Tahun 2011-2014

Perlambatan ini biasa terjadi setelah tingkat kemiskinan turun hingga level tertentu. Pada fase ini, penurunan kemiskinan membutuhkan upaya yang lebih keras, karena kemiskinan yang tersisa adalah kemiskinan kronis, atau sering disebut sebagai kerak kemiskinan. Fase ini membutuhkan upaya penanggulangan kemiskinan yang lebih spesifik dan bersasaran.

Perhitungan jumlah masyarakat miskin dan rentan mengacu pada Basis Data Terpadu (BDT) Program Perlindungan Sosial. Data yang dikumpulkan oleh BPS dan dikelola oleh TNP2K ini menyediakan nama dan alamat setiap orang pada tingkat kesejahteraan 40% terendah pada rerata nasional. Pendataan BDT pertama kali dilakukan pada Tahun 2011 dan telah diperbaharui pada Tahun 2015. Selain digunakan sebagai basis data sasaran program-program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan

sosial, data ini dapat memberikan informasi seberapa besar jumlah individu dan rumah tangga di Kabupaten Gresik yang berstatus kesejahteraan miskin dan rentan. Sementara data P0-P1-P2 merupakan data hasil survey dan tidak dapat dipetakan hingga level kecamatan atau desa, BDT memberikan informasi yang lebih detail dan dapat dipetakan hingga level kecamatan maupun desa. Di Kabupaten Gresik, data yang digunakan adalah 30% terendah rerata nasional, atau dikenal dengan desil 1,2 dan 3. Jumlah dan sebaran penduduk Kabupaten Gresik yang tercakup dalam desil 1,2 dan 3 BDT Tahun 2011 serta perbandingannya dengan Tahun 2015 terdapat pada Tabel 2.18 Jumlah Penduduk Miskin dan Rentan di Kabupaten Gresik.

Tabel 2.24

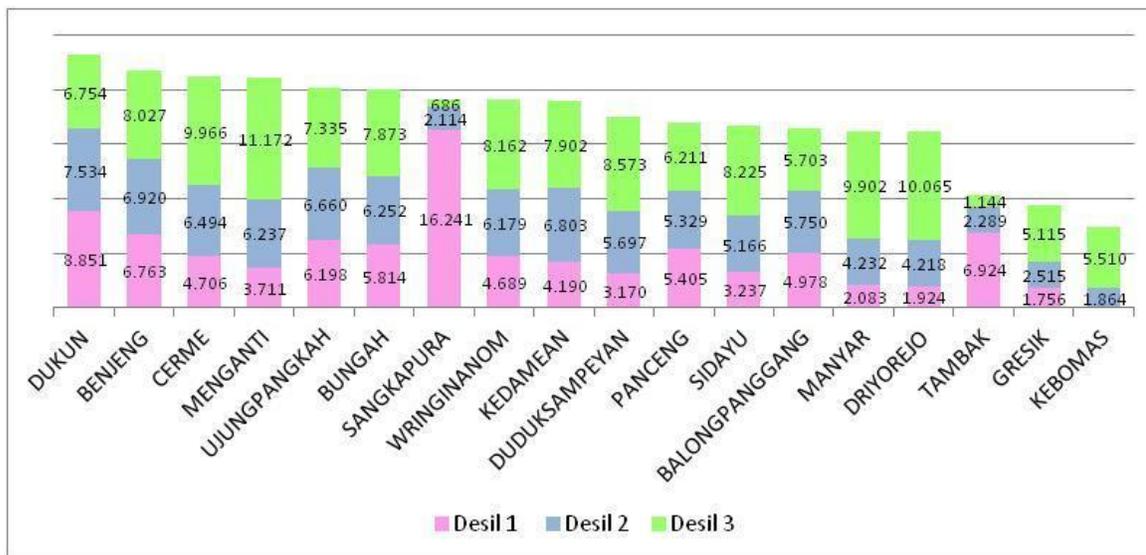
Jumlah Penduduk Miskin dan Rentan Kabupaten Gresik
(Penduduk Desil 1-3 Basis Data Terpadu Program Perlindungan Sosial)

No	Kecamatan	Tahun 2011		Tahun 2015	
		Jumlah Rumah Tangga	Jumlah Individu	Jumlah Rumah Tangga	Jumlah Individu
1	WRINGINANOM	8.087	27.907	6,081	19,030
2	DRIYOREJO	7.511	29.509	4,639	16,207
3	KEDAMEAN	6.942	24.710	5,690	18,895
4	MENGANTI	7.466	27.808	5,924	21,120
5	CERME	6.181	24.182	5,428	21,166
6	BENJENG	6.823	26.065	6,018	21,710
7	BALONGPANGGANG	4.759	17.279	4,479	16,431
8	DUDUKSAMPEAN	4.973	20.019	4,506	17,440
9	KEBOMAS	2.643	10.859	2,193	8,194
10	GRESIK	2.075	7.615	2,532	9,386
11	MANYAR	5.232	22.500	4,183	16,217
12	BUNGAH	5.532	23.619	5,155	19,939
13	SIDAYU	4.536	18.698	4,172	16,628
14	DUKUN	6.240	25.606	5,995	23,139
15	PANCENG	5.167	18.908	4,628	16,945
16	UJUNG PANGKAH	5.297	22.071	5,143	20,193
17	SANGKAPURA	5.135	20.364	5,013	19,041
18	TAMBAK	2.837	11.094	2,989	10,357
Jumlah		97.426	378.813	84,768	312,038

Sumber Data: Basis Data Terpadu Program Perlindungan Sosial (BDT /PPLS), Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), diolah.

Jumlah penduduk Desil 1-3 bervariasi pada tiap kecamatan. Yang terendah adalah Kecamatan Kebomas, dengan jumlah 8,194 jiwa, sedang yang tertinggi adalah kecamatan Dukun dengan jumlah 23,139 jiwa.

Adapun sebaran jumlah Desil 1-3 per kecamatan se Kabupaten Gresik sebagaimana pada Gambar berikut.

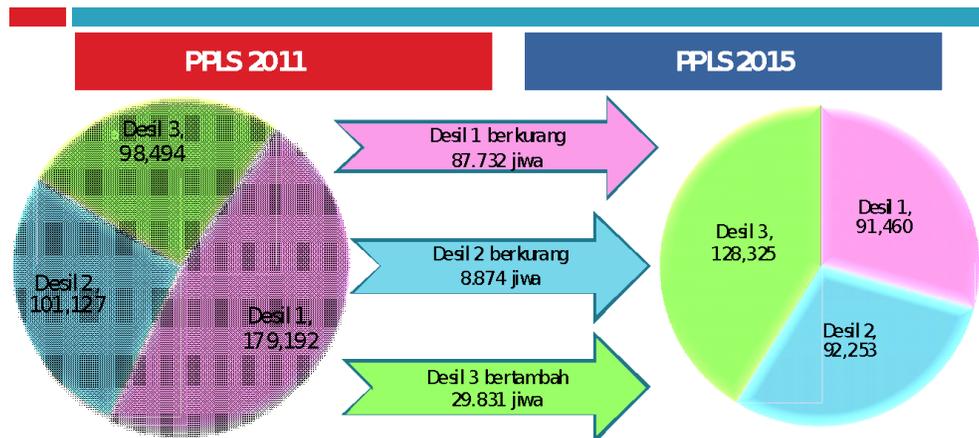


Gambar 2.14
Sebaran Penduduk Miskin dan Rentan Kabupaten Gresik
(Penduduk Desil 1-3 Basis Data Terpadu Program Perlindungan Sosial)

Sumber Data: Basis Data Terpadu Program Perlindungan Sosial (BDT / PPLS), Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), diolah.

Jumlah penduduk Kabupaten Gresik yang tercantum dalam Desil 1-3 BDT 2011 adalah sebesar 378.813 individu yang terdiri dari 97.426 rumah tangga. Pada BDT 2015, jumlah ini menurun menjadi 312.028, yang terdiri dari 84.768 rumah tangga. Indikasi naiknya tingkat kesejahteraan ini didukung dengan pergeseran desil yang mendominasi BDT. Pada BDT 2015 Kabupaten Gresik didominasi oleh Desil 3 (...%), sementara BDT 2011 didominasi oleh Desil 1. Hal ini menunjukkan peningkatan kesejahteraan pada kelompok masyarakat miskin dan rentan di Kabupaten Gresik.

PERBANDINGAN PPLS 2011 DAN PPLS 2015



Gambar 2.15

Perbandingan Desil pada BDT 2011 dan BDT 2015 Kabupaten Gresik (Penduduk Desil 1-3 Basis Data Terpadu Program Perlindungan Sosial)

Jumlah alokasi anggaran penanggulangan kemiskinan Kabupaten Gresik Tahun 2011 s.d. 2015 terus menunjukkan peningkatan hingga Tahun 2014. Pada Tahun 2015, jumlah alokasi anggaran ini menurun dikarenakan berakhirnya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, sehingga PAPBD tidak lagi mengalokasikan anggaran Dana Daerah Urusan Bersama (DDUB) kegiatan dimaksud.

Tabel 2.25

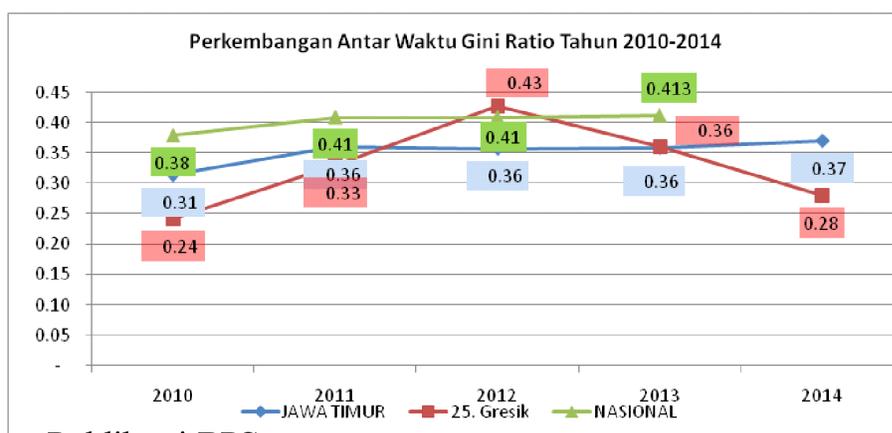
Alokasi Anggaran Penanggulangan Kemiskinan 2011-2015 di Kabupaten Gresik

Tahun	Gresik	Jawa Timur	Nasional
(a)	(b)	(c)	(d)
2011	36,325,491,245	4,858,830,000	65,647,850,562
2012	55,982,716,000	4,074,530,000	93,817,009,000
2013	73,559,146,300	4,415,915,164	136,783,221,447
2014	80,983,773,068	2,460,650,322	170,844,802,363
2015	53,580,035,532	5,709,149,150	149,511,080,602

Indeks Gini atau Koefisien Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan, Koefisien Gini bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna, atau satu orang memiliki

segalanya sementara orang-orang lainnya tidak memiliki apa-apa. Dengan kata lain, Koefisien Gini diupayakan agar mendekati 0 untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk.

Pada kurun waktu lima tahun, yaitu Tahun 2010 hingga Tahun 2014, perkembangan antar waktu Indeks Gini Kabupaten Gresik menunjukkan pergerakan yang berbeda dengan Provinsi Jawa Timur maupun Nasional. Sementara angka provinsi dan nasional menunjukkan kurva landai dan cenderung stagnan, Indeks Gini Kabupaten Gresik justru terlihat meningkat dan menurun dengan tajam. Pada Tahun 2012, Indeks Gini Kabupaten Gresik mencapai nilai tertinggi dalam lima tahun, yaitu 0,43 lalu mulai menurun. Pada Tahun 2014, Indeks Gini Kabupaten Gresik sebesar 0.28 dan masih lebih tinggi dari Indeks Gini Tahun 2010, yaitu 0.22. Meskipun demikian, nilai ini telah berhasil menjadi lebih rendah daripada Indeks Gini Provinsi Jawa Timur di tahun yang sama sebagaimana digambarkan sebagai berikut;



Sumber Data: Publikasi BPS

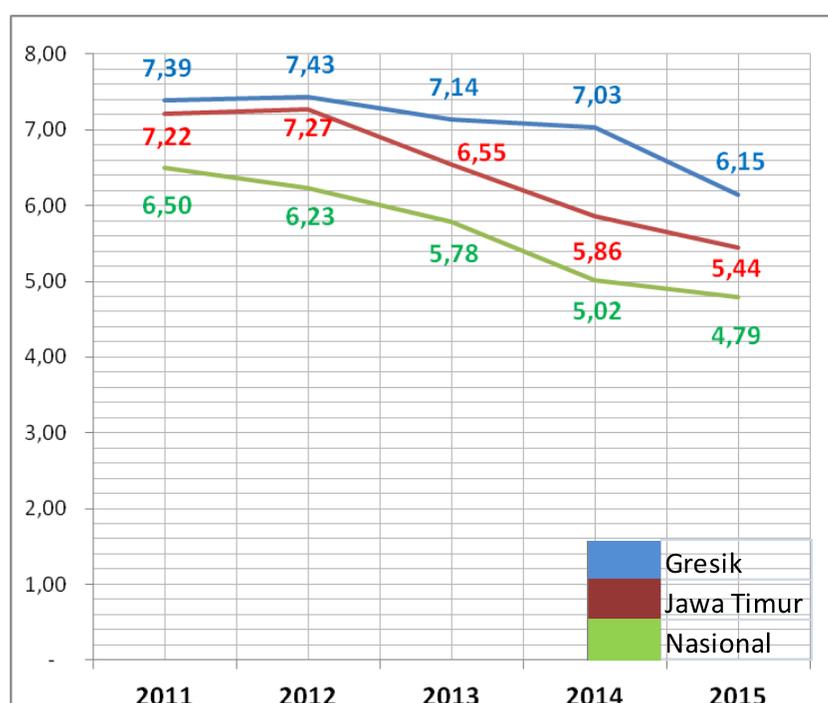
Gambar 2.16
Perbandingan Rasio Gini Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur dan Nasional

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

Untuk memberikan gambaran tentang keberhasilan pembangunan kesejahteraan masyarakat antara lain dapat diketahui melalui hasil evaluasi Program dan Kegiatan sampai dengan **Triwulan II (Terlampir)**.

2.2.3 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Pada kurun waktu 2011-2015 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gresik mengalami fluktuatif namun lebih tinggi atau di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dan rata-rata pertumbuhan ekonomi Nasional seperti terlihat pada gambar berikut :



Sumber data: BPS Kab. Gresik Tahun 2016

Gambar 2.17

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gresik Terhadap Jawa Timur dan Nasional Tahun 2011-2015

Perekonomian Kabupaten Gresik mengalami pertumbuhan sebesar 6,15% pada tahun 2015. Kondisi ini melambat 0,88 poin dibandingkan pada periode yang sama pada tahun sebelumnya yang mencapai sebesar 7,03%. Ditinjau berdasarkan posisi relatif Gresik terhadap Jawa Timur, pertumbuhan ekonomi Gresik di atas ekonomi Jawa Timur yang mengalami pertumbuhan 5,44% pada tahun 2015 atau melambat 0,42 poin dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya sebesar 5,86%. Kondisi ini selaras bila ditinjau dari posisi relatif Gresik terhadap nasional

pada tahun tahun 2015 yang tumbuh 4,79 persen atau melambat bila dibanding tahun 2014 yang mencapai 5,02 persen. Kondisi ini ditunjang infrastruktur yang ada di Kabupaten Gresik antara lain:

- a. Jalan Tol Surabaya – Gresik .
- b. Jalan Nasional sebagai jalan Arteri primer (Surabaya – Gresik – Lamongan)
- c. Jalan Nasional sebagai jalan Kolektor Primer (Gresik – Sadang lewat Pantura / Jl. Daendels).
- d. Jalan Propinsi sebagai jalan Kolektor Primer (Legundi – Bunder, Lakarsantri – Bringkang, Wringinanom – Driyorejo – Surabaya).
- e. Kawasan Industri;
- f. Pelabuhan Umum dan 7 Pelabuhan khusus.

Ditinjau dari sisi pengelolaan keuangan, pengelolaan keuangan daerah telah mengalami perbaikan manajemen secara komprehensif menghadapi sistem akuntansi berbasis akrual. Selama tahun 2011s.d. 2014, **Opini Laporan Keuangan** Kabupaten Gresik mendapatkan predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) sedangkan pada tahun 2015 mengalami peningkatan dengan meraih predikat Wajar tanpa pengecualian. Hal ini menunjukkan bahwa Pernyataan professional pemeriksa terhadap informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan dan didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern telah dilaksanakan secara fair atau wajar.

Perbaikan secara fundamental terhadap pengelolaan keuangan dan aset daerah menunjukkan birokrasi pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Kondisi ini mendukung kemampuan daerah dalam meningkatkan penggalan potensi-potensi daerah dan secara simultan meningkatkan pendapatan asli daerah.

2.2.4 Fokus Iklim Berinvestasi

Realisasi investasi penanaman modal Kabupaten Gresik mengalami peningkatan secara konsisten terutama di sektor penanaman modal dalam negeri sedangkan di sektor penanaman modal asing mengalami fluktuatif dengan nilai investasi terbesar terjadi pada Tahun 2013 sedangkan investasi terendah terjadi pada tahun 2015.

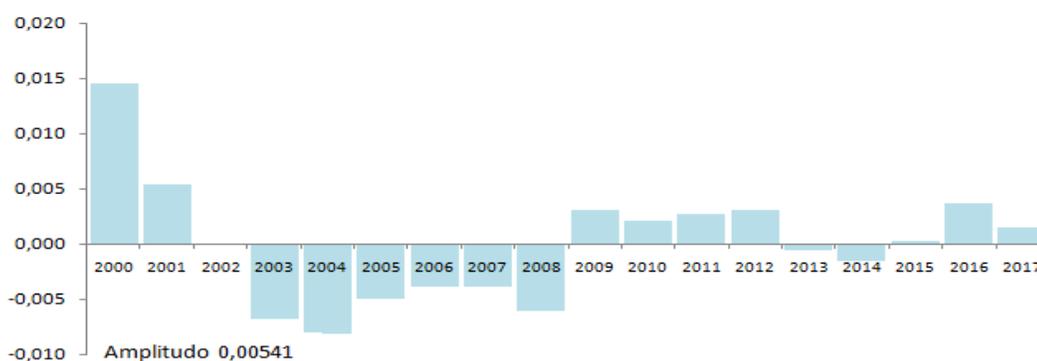
Keberhasilan dalam peningkatan realisasi penanaman modal tersebut didukung oleh kemudahan dalam pelayanan perizinan di daerah serta kesiapan regulasi yang mendukung penanaman modal di daerah; ketersediaan infrastruktur dan penataan perwilayah untuk mendukung realisasi penanaman modal; peningkatan kegiatan promosi akan potensi daerah; dan dukungan Pemerintah Pusat untuk Pengembangan Penanaman Modal yang progresif di wilayah Kabupaten Gresik antara lain pengembangan pelabuhan laut, prasarana transportasi dan kawasan industri, dll. Realisasi investasi dijelaskan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.26
Realisasi Investasi Penanaman Modal di Kabupaten Gresik
Tahun 2012 s.d. 2014

No	Uraian	Satuan	2012	2013	2014	2015
1.	Realisasi Investasi PMDN	Rp. Juta	3.292.566	4.794.719	8.998.738,4	671.413,6
2.	Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing	US \$ (000)	715.790,7	842.750,3	171.921,6	152.925.400

Sumber : LKPJ AMJ Kabupaten Gresik 2011-2015

Berdasarkan kajian ekonomi makro regional, siklus bisnis Kabupaten Gresik menunjukkan perkembangan yang cukup pada tahun 2013 s.d 2015. Amplitude siklus bisnis sebesar 0.001821 atau lebih kecil dibandingkan periode 2000-2008 yang mencapai 0.007305. Semakin kecil amplitudo yang ditunjukkan maka siklus bisnis sebagai fluktuasi dari aggregate economic activity mengalami stabilitas sebagaimana disajikan sebagai berikut;



Gambar 2.18

Amplitudo Siklus Kabupaten Gresik

Sumber : Kajian Analisis Ekonomi Makro Regional Tahun 2014

2.2.5 Fokus Sumber Daya Manusia

Ditinjau dari **Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**, Kabupaten Gresik dari tahun 2010 sampai 2014 mengalami peningkatan diiringi dengan komponen penyusun IPM meliputi Angka Harapan Hidup, rata-rata lama sekolah, hingga pengeluaran per kapita. Pada tahun 2010, AHH penduduk Kabupaten Gresik telah mencapai 70,98 tahun dan selalu mengalami kenaikan setiap tahun, untuk tahun 2014 sudah mencapai 71,67 tahun. AHH Kabupaten Gresik tahun 2010 sampai 2014 meningkat sebesar 0,69 tahun. Angka Melek Huruf tahun 2014 mengalami kenaikan disbanding tahun sebelumnya sebesar 0,20 poin. Sementara Angka Rata-rata Lamanya Sekolah (MYS) dari tahun 2013 ke 2014 naik 0,02 poin yaitu dari 9,00 menjadi 9,02 angka ini berarti program wajib belajar 9 tahun di Kabupaten Gresik sudah tercapai. Pengeluaran per-kapita dalam 5 tahun terakhir mengalami peningkatan sebesar Rp 13.860,-.

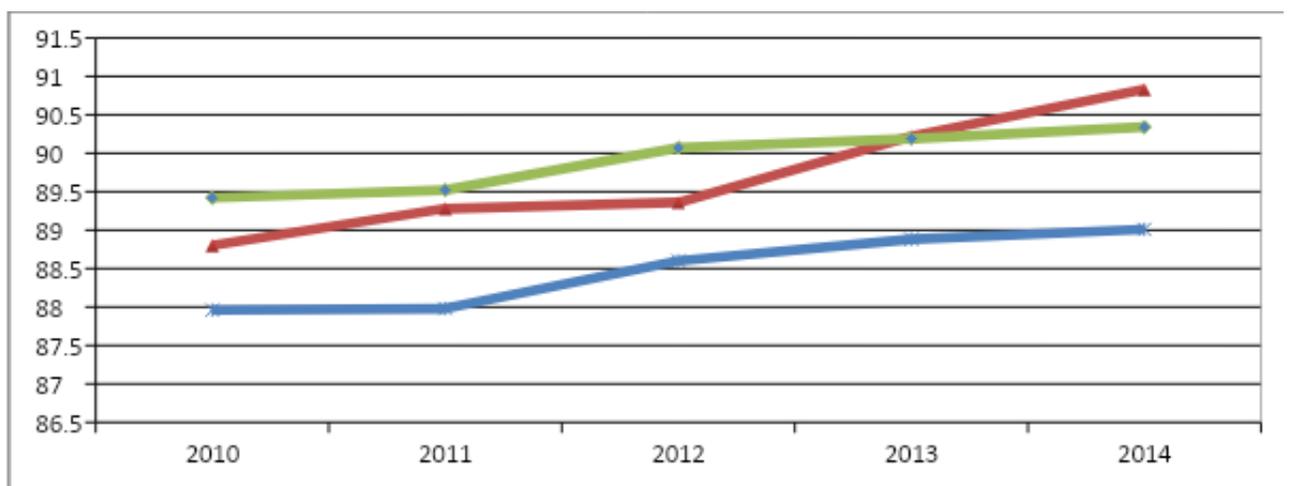
Tabel 2.27
Besarnya Nilai IPM Kabupaten Gresik dan Komponen
Komponennya Selama tahun 2010-2014

Indeks	2010	2011	2012	2013	2014
IPM	74,47	75,17	75,97	76,36	76,75
Angka Harapan Hidup (tahun)	70,98	71,22	71,47	71,57	71,67
Angka Melek Huruf (persen)	94,47	94,56	96,17	96,38	96,58
Angka Rata-Rata Lamanya sekolah (tahun)	8,53	8,84	8,98	9,00	9,02
Pengeluaran Per kapita (Rp000)	640,59	644,70	647,31	650,79	654,45

Catatan: Angka IPM dihitung oleh BPS RI.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) disusun dari tiga komponen yaitu lamanya hidup, diukur dengan harapan hidup pada saat lahir; tingkat pendidikan, diukur dengan kombinasi antara angka melek huruf pada penduduk 15 tahun ke atas (dengan bobot 2/3) dan rata-rata lama sekolah (dengan bobot 1/3) serta tingkat kehidupan yang layak, diukur dengan pengeluaran perkapita yang telah disesuaikan Purchasing Power Parity (PPP rupiah).

Sedangkan dari sisi pengarusutamaan Gender sebagaimana diukur melalui **Indeks Pembangunan Gender** dijelaskan bahwa Indeks Pembangunan Gender merupakan indeks komposit yang dibangun dari beberapa variable untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia dengan memperhitungkan disparitas gender. Sebelum Tahun 2010, perhitungan IPG tidak mengukur langsung ketimpangan gender yang terjadi, namun hanya disparitas dari masing-masing komponen IPM untuk setiap gender. Pada metode ini, interpretasi IPG tidak bisa dipisahkan dari IPM. IPG Tahun 2010 - 2014, yang dihitung pada Tahun 2014, dilakukan dengan metode yang baru. Perubahan Metode ini merupakan penyesuaian dari perubahan yang terjadi pada IPM. Selain itu, metode baru ini merupakan pengukuran langsung terhadap ketimpangan antar gender dalam pencapaian IPM. Pada metode baru ini digunakan rasio IPM Perempuan dan IPM Laki-laki, sehingga bisa terlihat pencapaian pembangunan manusia antara perempuan dan laki-laki.



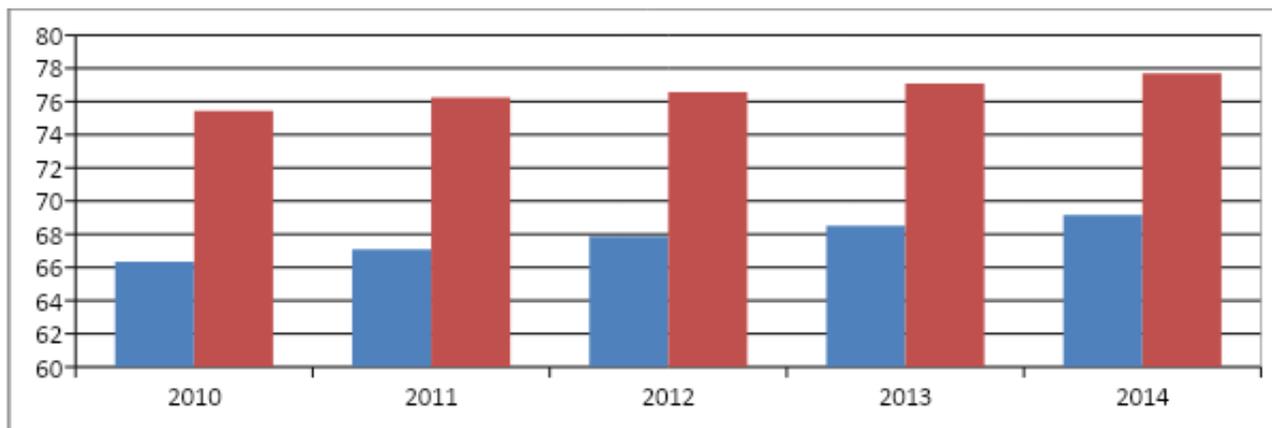
Gambar 2.19

Perbandingan Antar Waktu IPG Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur dan Nasional

Sumber: Badan PPKB Prov Jatim / BPS Prov Jatim, Buku "Pembangunan Manusia Berbasis Gender Jawa Timur Tahun 2015", diolah.

Gambar 2.19 Perbandingan Antar Waktu IPG Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur dan Nasional menunjukkan kondisi capaian IPG Kabupaten Gresik meningkat dengan konsisten dalam kurun waktu lima tahun terakhir, namun masih berada dibawah capaian Provinsi Jawa Timur dan Nasional. Sebagaimana disebutkan diatas, IPG merupakan perbandingan antara IPM Laki-Laki dan IPM Perempuan. Capaian Kabupaten Gresik yang lebih rendah daripada Provinsi Jawa Timur maupun

Nasional, menunjukkan bahwa ketimpangan antara capaian IPM Laki-Laki dan Perempuan di Kabupaten Gresik lebih tinggi daripada rata-rata ketimpangan di tingkat provinsi maupun nasional.



Gambar 2.20

IPM Laki-Laki dan IPM Perempuan di Kabupaten Gresik

Sumber : Badan PPKB Prov Jatim / BPS Prov Jatim, Buku “Pembangunan Manusia Berbasis Gender Jawa Timur Tahun 2015”, diolah.

Gambar ... diatas menunjukkan bahwa dalam kurun waktu Tahun 2010-2015, kendati terus menunjukkan peningkatan, IPM Perempuan di Kabupaten Gresik dari tahun ke tahun selalu lebih rendah daripada IPM Laki-laki. Selisih IPM Perempuan dan Laki-Laki berkisar antara 8-9 poin, dengan kecenderungan terus mengecil setiap tahunnya seperti yang terlihat pada perkembangan IPG Kabupaten Gresik.

Dalam perhitungan metode baru, komponen IPG, seperti juga IPM, meliputi Angka Harapan Hidup, Expected Years of Schooling / Angka Harapan Lama Sekolah, Mean Years of Schooling / Angka Rata-Rata Lama Sekolah Usia 25 Tahun ke atas dan Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan. Perkembangan IPG serta IPM Perempuan dan Laki-laki Kabupaten Gresik mengindikasikan dibutuhkannya kerja keras untuk mencapai kesetaraan perempuan dan laki-laki dalam kesehatan, pendidikan dan standar hidup layak, yang dalam hal ini diukur dengan pengeluaran per kapita. Untuk mempercepat peningkatan IPG, komponen-komponen tersebut harus ditingkatkan dengan memperhatikan unsur gender dalam perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasinya, serta memastikan perempuan dan laki-laki mendapatkan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang setara.

Sedangkan dalam perhitungan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) disusun berdasarkan tiga komponen, yaitu keterwakilan dalam parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional, manager, administrasi dan teknisi, dan sumbangan pendapatan. IDG merupakan ukuran keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan, digunakan untuk mengukur persamaan peran antara perempuan dan laki-laki dalam kehidupan ekonomi, politik dan pengambilan keputusan. IDG merupakan indeks komposit yang digunakan untuk mengkaji sejauh mana persamaan peranan perempuan dalam proses pengambilan keputusan serta kontribusi dalam aspek ekonomi dan sosial.



Gambar 2.21

Perkembangan Antar Waktu Capaian IDG Kabupaten Gresik

Sumber : Badan PPKB Prov Jatim / BPS Prov Jatim, Buku “Pembangunan Manusia Berbasis Gender Jawa Timur Tahun 2015”, diolah.

IDG Kabupaten Gresik menunjukkan perkembangan yang berfluktuasi dalam kurun waktu Tahun 2010-2014. Seperti terlihat pada Gambar 2.21 Perkembangan Antar Waktu Capaian IDG Kabupaten Gresik, capaian IDG Kabupaten Gresik pada Tahun 2010 sebesar 62.56, dan pada Tahun 2014 sebesar 62.26 atau turun 0.3 poin. Melihat perkembangan antar waktunya, angka ini pernah meningkat dalam tiga tahun, yaitu Tahun 2011, 2012 dan 2013, dengan kenaikan tajam pada Tahun 2013, namun turun tajam pada Tahun 2014. Kondisi itu terjadi baik pada tingkat kabupaten maupun provinsi. Pada tingkat provinsi, kondisi ini terutama dipengaruhi oleh turunnya keterwakilan perempuan di dalam parlemen, dari semula 19, menjadi 15 di Tahun 2014. Di Kabupaten Gresik,

keterwakilan perempuan di parlemen sebesar 10% pada Tahun 2014, atau turun dua poin dari periode sebelumnya yang mencapai 12%. Angka ini juga lebih rendah daripada provinsi Jawa Timur.

Bab III

Perubahan Asumsi Dasar Kebijakan Umum APBD

3.1 Perubahan Asumsi Dasar Kebijakan Umum APBD

APBD Kabupaten Gresik Tahun 2016 disusun berdasarkan asumsi-asumsi dasar sebagaimana tertuang dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2016 meliputi:

1. Asumsi dasar yang digunakan yaitu:
 - a. Pertumbuhan Ekonomi;
 - b. Inflasi;
 - c. Tingkat Kemiskinan; dan
 - d. Tingkat Pengangguran Terbuka;
 - e. Pertumbuhan PDRB Kabupaten Gresik.
2. Asumsi lainnya.

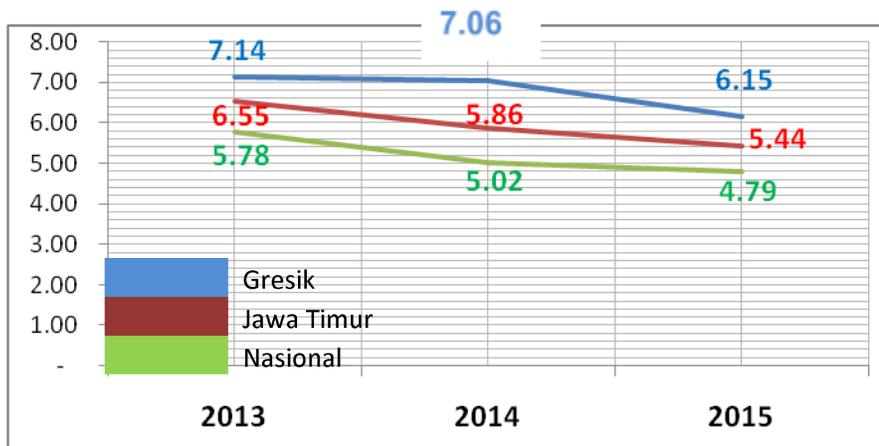
Berdasarkan perkembangan kondisi makro ekonomi di tingkat global dan pelbagai faktor lainnya meliputi konstelasi sosial politik dalam dan luar negeri, kondusifitas negara, perubahan kebijakan fiskal maupun moneter, hingga sentimen investor terhadap pasar menyebabkan perubahan asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan APBD antara lain:

a. Pertumbuhan Ekonomi

Ekonomi Kabupaten Gresik mengalami pertumbuhan sebesar 6,15% pada tahun 2015. Kondisi ini melambat 0,91 poin dibandingkan pada periode yang sama pada tahun sebelumnya yang mencapai 7,06%. Ditinjau berdasarkan posisi relatif Gresik terhadap Jawa Timur, pertumbuhan ekonomi Gresik di atas ekonomi Jawa Timur yang mengalami pertumbuhan 5,44% pada tahun 2015 atau melambat 0,42 poin dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya sebesar 5,86%. Kondisi ini selaras bila ditinjau dari posisi relatif Gresik terhadap nasional pada tahun tahun 2015 yang tumbuh 4,79 persen atau melambat bila dibanding tahun 2014 yang mencapai 5,02 persen. Posisi relatif perbandingan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Gresik dengan daerah sekitar, Provinsi Jawa Timur dan Nasional dapat dilihat pada grafik berikut:

Gambar 3.1

Posisi Relatif Pertumbuhan Ekonomi Gresik dengan Daerah Sekitar, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional



Sumber data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik Tahun 2015

Ditinjau dari posisi relatif dibandingkan dengan Kabupaten/Kota Lainnya, pada tahun 2014 Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gresik tumbuh lebih tinggi dibandingkan Kabupaten/Kota sekitar meskipun pada tahun tersebut seluruh Kabupaten/kota mengalami perlambatan dengan penurunan pertumbuhan ekonomi terbesar pada kota Surabaya sebanyak 0,71% sedangkan Gresik hanya melambat 0,08%.

Tabel 3.2

Posisi Relatif Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota sekitar Gresik

Kota	2011	2012	2013	2014
Mojokerto	6.61	7.26	6.48	6.36
Sidoarjo	7.04	7.26	6.88	6.18
Lamongan	6.67	6.92	6.86	6.41
Surabaya	7.13	7.35	7.58	6.73
Gresik	6.48	6.92	7.14	7.06

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur Tahun 2015

b. Inflasi

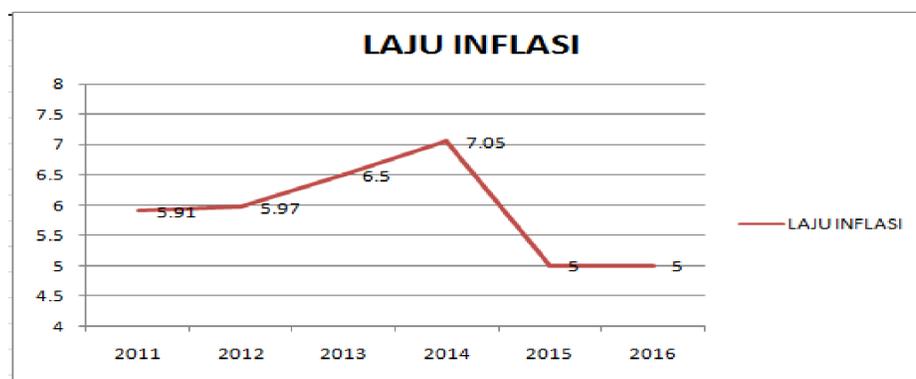
Selama tahun 2011-2014, tingkat inflasi Kabupaten Gresik menunjukkan fluktuasi yang tinggi yang disebabkan oleh pelbagai faktor baik di tingkat lokal, regional, maupun nasional seperti kenaikan tarif dasar listrik, tarif angkutan, kenaikan harga BBM, kerusakan infrastruktur yang menghambat distribusi, hingga terjadinya force major seperti bencana alam.

Pengendalian tingkat inflasi merupakan upaya dalam menciptakan ketidakpastian nilai uang, tingkat produksi, distribusi dan arah pengembangan ekonomi serta daya beli dan permintaan masyarakat akan barang dan jasa yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Sedangkan laju inflasi Kabupaten Gresik pada Tahun 2015 mengalami penurunan menjadi 5%.

Data inflasi Kabupaten Gresik Tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 dapat disajikan dalam gambar berikut:

Gambar 3.2

Laju Inflasi Kab. Gresik Tahun 2011-2015



Sumber: BPS Kabupaten Gresik Tahun 2015

c. Tingkat Kemiskinan

Pada sektor pengentasan kemiskinan, Kabupaten Gresik telah meraih progress yang positif dengan penurunan tingkat kemiskinan secara bertahap. Penurunan secara stabil tersebut masih menunjukkan capaian basis poin yang rendah atau dapat istilahkan mengalami perlambatan penurunan. Penyebab kondisi ini disetimasikan karena kondisi kemiskinan Kabupaten Gresik yang memasuki level kronis sehingga membutuhkan program dan kebijakan pengentasan kemiskinan yang sesuai dengan karakteristik Kabupaten Gresik. Informasi terkait kondisi kemiskinan di Kabupaten Gresik dapat dilihat dalam beberapa tabel berikut :

Tabel 3.3

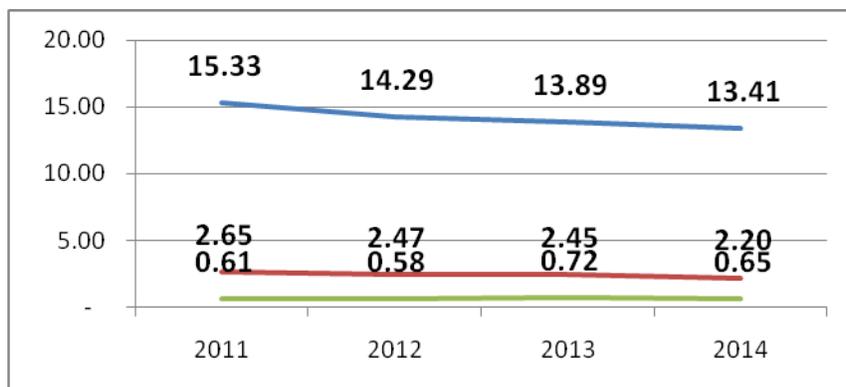
Tingkat (Po), Kedalaman (P1), dan Keparahan (P2) Kemiskinan Kabupaten Gresik Tahun 2008-2014

Tahun	PO	P1	P2	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)
2008	21.43	6.88	2.39	248,807.00
2009	19.14	3.13	0.79	225,774.00
2010	16.42	1.99	0.41	193,813.00
2011	15.33	2.65	0.61	181,700.00
2012	14.29	2.47	0.58	172,300.00
2013	13.89	2.45	0.72	171,600.00
2014	13.41	2.20	0.65	166,950.00

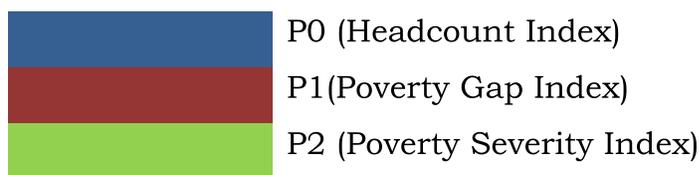
Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur Tahun 2015

Gambar 3.3

Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kab. Gresik Tahun 2011-2014



Sumber data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik Tahun 2015



Tabel 3.4

Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Gresik

No	Kecamatan	Tahun 2011		Tahun 2015	
		Jumlah Rumah Tangga	Jumlah Individu	Jumlah Rumah Tangga	Jumlah Individu
1	WRINGINANOM	8.087	27.907	6.833	21.459
2	DRIYOREJO	7.511	29.509	5.912	20.571
3	KEDAMEAN	6.942	24.710	6.126	20.170
4	MENGANTI	7.466	27.808	7.071	24.764
5	CERME	6.181	24.182	6.234	23.901
6	BENJENG	6.823	26.065	6.543	23.454
7	BALONGPANGGANG	4.759	17.279	4.770	17.292
8	DUDUKSAMPEAN	4.973	20.019	5.219	19.884
9	KEBOMAS	2.643	10.859	3.145	11.499
10	GRESIK	2.075	7.615	3.192	11.416
11	MANYAR	5.232	22.500	5.273	20.119
12	BUNGAH	5.532	23.619	5.728	22.064
13	SIDAYU	4.536	18.698	4.842	18.875
14	DUKUN	6.240	25.606	6.319	24.319
15	PANCENG	5.167	18.908	4.932	17.824
16	UJUNG PANGKAH	5.297	22.071	5.619	21.871
17	SANGKAPURA	5.135	20.364	5.049	19.142
18	TAMBAK	2.837	11.094	3.024	10.456
Jumlah		97.426	378.813	95.831	349.080

Po tingkat Kemiskinan yaitu persentase penduduk miskin yang berada di bawah garis kemiskinan, jumlah penduduk miskin sebanyak 181.700 jiwa pada tahun 2011 menurun 14.750 jiwa hingga menjadi 166,950.00 jiwa pada tahun 2014. Adapun **P1** Indeks Kedalaman Kemiskinan yaitu ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Bila indeks kedalaman kemiskinan semakin menurun artinya rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin semakin menyempit. Sedangkan **P2** Indeks Keparahan Kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Bila, indeks semakin menurun maka ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin semakin berkurang.

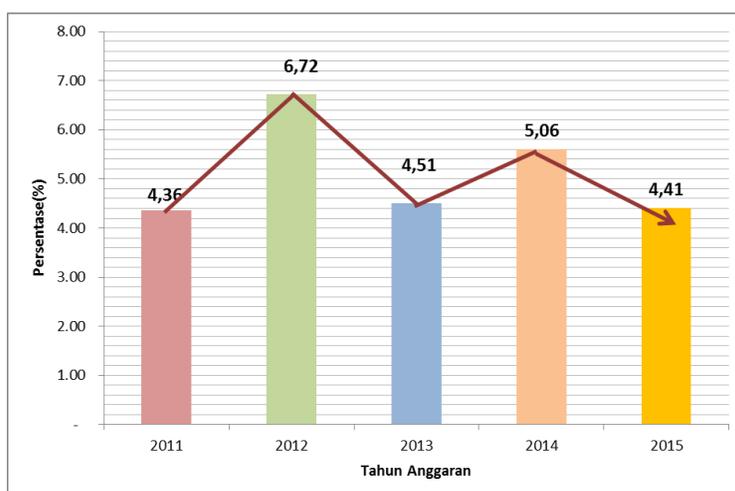
d. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran Kabupaten Gresik pada tahun 2015 menunjukkan capaian yang positif pada level 4,41% atau menurun 0,65 poin

dibandingkan tahun 2014 yang mencapai 5.06%. secara trendline Perkembangan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Gresik selama Tahun 2011-2015 mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Gresik menekan angka pengangguran pada tahun 2013 hingga mencapai 4.51% dari 6.72% pada tahun 2012 ternyata tidak diiringi pada tahun berikutnya. Pengangguran meningkat tipis 0.15% atau mencapai 5,06% pada tahun 2014. Gejolak tingkat pengangguran ini disebabkan oleh pelbagai hal persaingan pencari kerja yang kompetitif antara masyarakat lokal dan masyarakat di luar Gresik, kultur budaya pencari kerja, persyaratan kompetensi yang dibutuhkan, hingga bentuk investasi.

Gambar 3.4

Tingkat Pengangguran Kabupaten Gresik Tahun 2011-2015



Sumber data: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik Tahun 2016

e. Pertumbuhan PDRB Kabupaten Gresik

Ditinjau dari kerangka ekonomi makro berdasarkan data termutakhir, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Gresik Atas Dasar Harga Konstan 2010 mencapai Rp76.340.445.190.000 atau mengalami peningkatan 7,06% dibandingkan dengan periode sebelumnya. Hal ini selaras dengan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku yang mencapai Rp93.813.296.070.000 atau meningkat 12,72% dibandingkan dengan periode sebelumnya. Adapun secara rinci PDRB Kabupaten Gresik dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.5**PDRB Kabupaten Gresik Tahun 2014-2015**

NO.	SEKTOR / SUB SEKTOR	SATUAN	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku		PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010	
			2013**	2014***	2013**	2014***
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Juta Rupiah	6,305,971.72	7,254,894.30	4,986,147.39	5,244,109.17
B	Pertambangan dan Penggalian	Juta Rupiah	10,245,762.79	11,493,102.34	7,797,528.89	8,531,409.27
C	Industri Pengolahan	Juta Rupiah	39,960,124.34	45,213,679.15	34,834,077.53	37,263,961.91
D	Pengadaan Listrik dan Gas	Juta Rupiah	363,811.14	376,934.26	417,222.28	431,674.29
E	Pengadaan Air, Penelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	Juta Rupiah	52,878.83	56,577.78	46,400.24	47,060.05
F	Konstruksi	Juta Rupiah	6,623,078.59	7,771,712.32	5,842,464.55	6,336,211.23
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Juta Rupiah	9,564,482.23	10,617,743.21	8,377,567.68	8,935,823.02
H	Transportasi dan Pergudangan	Juta Rupiah	1,794,461.81	2,045,565.11	1,528,906.37	1,619,184.73
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Juta Rupiah	892,743.70	1,051,827.94	765,685.76	835,346.00
J	Informasi dan Komunikasi	Juta Rupiah	3,019,245.00	3,221,708.46	2,938,569.00	3,131,927.07
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	Juta Rupiah	888,457.38	997,535.45	768,801.00	811,255.13
L	Real Estate	Juta Rupiah	968,157.82	1,037,164.51	891,850.11	948,999.87
M,N	Jasa Perusahaan	Juta Rupiah	221,696.00	245,394.83	183,423.44	199,106.15
O	Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	Juta Rupiah	1,063,516.29	1,095,668.28	883,884.78	890,043.69
P	Jasa Pendidikan	Juta Rupiah	679,522.49	751,311.55	576,431.64	616,608.93
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	Juta Rupiah	292,050.94	332,783.24	261,977.00	282,844.95
R,S,T,U	Jasa Lainnya	Juta Rupiah	218,772.84	249,683.35	204,475.99	214,879.73
	Jumlah	Juta Rupiah	83,154,733.92	93,813,296.07	71,304,515.32	76,340,445.19

Sumber data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik Tahun 2015

Catatan:

** Angka Sementara

*** Angka Sangat Sementara

Struktur ekonomi Kabupaten Gresik berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku didominasi oleh industri pengolahan dengan 48,20%. Sedangkan sektor dengan persentase terendah adalah Pengadaan Air, Penelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang dengan

0,06%. Adapun secara rinci Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Gresik dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.6

Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Gresik Tahun 2013-2014

NO.	SEKTOR / SUB SEKTOR	SATUAN	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku	
			2013**	2014***
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	%	7.58	7.73
B	Pertambangan dan Penggalian	%	12.32	12.25
C	Industri Pengolahan	%	48.06	48.20
D	Pengadaan Listrik dan Gas	%	0.44	0.40
E	Pengadaan Air, Penelolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	%	0.06	0.06
F	Konstruksi	%	7.96	8.28
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	%	11.50	11.32
H	Transportasi dan Pergudangan	%	2.16	2.18
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	%	1.07	1.12
J	Informasi dan Komunikasi	%	3.63	3.43
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	%	1.07	1.06
L	Real Estate	%	1.16	1.11
M,N	Jasa Perusahaan	%	0.27	0.26
O	Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	%	1.28	1.17
P	Jasa Pendidikan	%	0.82	0.80
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	%	0.35	0.35
R,S,T,U	Jasa Lainnya	%	0.26	0.27
	Jumlah	Juta (Rp)	100.0	100.0

Sumber data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik Tahun 2015

Tabel 3.7

Pendapatan Per Kapita Kabupaten Gresik Tahun 2009-2014

Tahun	PDRB ADHB (Juta Rp)	PDRB ADHK Tahun 2000 (Juta Rp)	Pendapatan Per Kapita (Mengacu PDRB ADHB)	Pendapatan Per Kapita (Mengacu PDRB ADHK)	Jumlah Penduduk
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
2009	32,117,667.00	15,322,529.00	26,253,286.60	12,524,781.00	1,223,377.00
2010	38,024,382.95	17,074,646.75	30,732,635.03	13,800,326.16	1,237,264.00
2011	44,082,264.57	18,081,043.89	37,450,000.00	15,270,000.00	1,270,351.00
2012	50,185,435.99	19,424,161.63	41,420,000.00	16,030,000.00	1,307,995.00
2013	57,264,224.40	20,811,653.46	46,670,000.00	16,960,000.00	1,324,777.00
2014	65,609,306.73	22,274,018.91	49,729,864.71	16,883,030.81	1,319,314.00

Sumber data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik Tahun 2015

2. Asumsi-asumsi lainnya

Asumsi lainnya yang mempengaruhi perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 adalah penerapan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) di Bidang Kesehatan dan Ketenagakerjaan.

3.2 **Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah**

Dengan melihat kondisi aktual kinerja ekonomi daerah dan nasional, serta memperhatikan realisasi APBD Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2016 dan evaluasi kinerja bidang pendapatan sampai dengan bulan Juni 2016, maka kebijakan pendapatan perubahan APBD Kabupaten Gresik diarahkan sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah yang dianggarkan dalam Perubahan APBD T.A 2016 mempertimbangkan:
 - a) Perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan;
 - b) Realisasi Pendapatan Asli Daerah sampai dengan bulan Juni tahun 2016;
2. Penyesuaian dana perimbangan yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
3. Penyesuaian alokasi dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat berupa Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD dan Dana Kapitasi yang berpedoman pada Keputusan Penetapan Alokasi dari Kementerian Keuangan.
4. Penyesuaian pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa layanan, hibah, hasil kerjasama dengan pihak ketiga, APBD, APBN dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

3.3 **Perubahan Kebijakan Belanja Daerah**

Perubahan Kebijakan Belanja Daerah pada Tahun 2016 dilakukan karena adanya perubahan sasaran dan target program kegiatan, pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, menambah atau mengurangi anggaran belanja program dan kegiatan, mengakomodasi program dan kegiatan yang belum selesai dalam Tahun 2015.

Perubahan Kebijakan Belanja Tidak Langsung daerah diarahkan pada :

- a. Penyesuaian alokasi gaji dan tunjangan pegawai Negeri Sipil (PNS).
- b. Penyesuaian tunjangan profesi guru PNSD.
- c. Penyesuaian Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa serta Dana Desa (APBN).

Perubahan Kebijakan Belanja Langsung daerah diarahkan pada:

- a. Penyesuaian Anggaran Dana Alokasi Khusus.
- b. Penyesuaian Alokasi Anggaran Belanja Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.
- c. Penyesuaian Alokasi Anggaran SKPD dan BLUD.
- d. Pergeseran atau penambahan belanja langsung lainnya.

3.4 **Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah**

Perubahan kebijakan pembiayaan daerah pada Tahun Anggaran 2016 diarahkan pada Penyesuaian penerimaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2015.

Bab IV

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Tema Pembangunan Nasional pada RKP Tahun 2016 adalah “Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Untuk Meletakkan Pondasi Pembangunan yang Berkualitas” dan Tema Pembangunan Provinsi Jawa Timur pada RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 adalah “Percepatan Pembangunan Infrastruktur Untuk Meningkatkan Daya Saing Dalam Menghadapi MEA Akhir 2015”. Berdasarkan tema pembangunan yang telah dirumuskan di tingkat nasional dan provinsi tersebut serta memperhatikan isu-isu strategis di tingkat lokal, nasional, maupun global maka tema Pembangunan Kabupaten Gresik Tahun 2016 berikut RKPD Perubahan dirumuskan sebagai berikut:

“Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan dan Pemerataan Perekonomian Untuk Kesejahteraan Masyarakat “

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Gresik tahun 2016. RKPD Perubahan memperhatikan Keputusan Bersama DPRD Kabupaten Gresik Dan Bupati Gresik Provinsi Jawa Timur Nomor 188/3/437.40/2016 dan 188/5/437.12/2016 Tentang Persetujuan Bersama Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021 untuk Ditetapkan Menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana berikut:

Misi Pertama *“Meningkatkan pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat untuk menumbuhkan perilaku masyarakat yang berakhlak mulia sesuai dengan simbol Gresik sebagai Kota Wali dan Kota Santri”* ditetapkan tujuan yaitu;

Mewujudkan keharmonisan sosial berlandaskan keluhuran Budaya Gresik didukung kondusifitas dan ketangguhan daerah.

Penetapan Sasaran Pembangunan Tujuan Misi Pertama didukung 3 (tiga) Agenda Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah meliputi Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat, Kepemudaan dan olahraga, dan Kebudayaan sebagaimana berikut;

Sasaran urusan **Ketentraman, Ketertiban Umum, & Perlindungan**

Masyarakat meliputi;

Sasaran ke-1

Menciptakan ketentraman dan ketertiban umum dengan menguatkan peran dan keberdayaan masyarakat

Sasaran ke-2

Mewujudkan ketangguhan Daerah dalam menghadapi dan mengurangi resiko bencana dan Kebakaran

Sasaran pada urusan **Kepemudaan dan Olahraga** meliputi;

Sasaran ke-3

Membangun partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah dengan menumbuhkembangkan budaya olahraga dan prestasi, menguatkan jiwa kepemimpinan dan patriotisme, dan menggugah kreatifitas dalam kemandirian

Sasaran pada urusan **Kebudayaan** meliputi;

Sasaran ke-4

Mewujudkan karakter bangsa yang berakhlak mulia berlandaskan keluhuran budaya serta meningkatkan inovasi dan kreasi karya seni dan budaya berbasis kearifan lokal maupun adaptif terhadap perkembangan global

Misi Kedua “Meningkatkan pelayanan yang adil dan merata kepada masyarakat dan pengusaha melalui tata kelola pemerintahan yang baik” ditetapkan tujuan yaitu;

Tujuan ke-1

Menghadirkan pelayanan yang adil dan merata kepada masyarakat dan pelaku usaha;

Tujuan ke-2

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik berlandaskan profesionalisme birokrasi dan penguatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah secara komprehensif

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan ke-1 misi ke-2 ditetapkan sasaran strategis yaitu :

Sasaran pada urusan **Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil** meliputi;

Sasaran ke-1

Meningkatkan kualitas dan kebermanfaatan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang akurat serta inovatif berbasis teknologi

Sasaran pada urusan **Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian** meliputi;

Sasaran ke-2

Mewujudkan penyelenggaraan e-Government yang menjamin keterbukaan informasi didukung ketersediaan dan validitas data sektoral yang komprehensif serta perlindungan terhadap akses informasi.

Sasaran pada urusan **Kecamatan** meliputi;

Sasaran ke-3

Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan fasilitasi pelayanan publik yang berkualitas serta partisipatif di tingkat Kecamatan.

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan ke-2 misi ke-2 ditetapkan sasaran strategis yaitu

Sasaran pada urusan **Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan** meliputi;

Sasaran ke-4

Menghadirkan keselarasan pembangunan daerah melalui komprehensifitas perencanaan dan inovasi daerah.

Sasaran pada urusan **Inspektorat** meliputi;

Sasaran ke-5

Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan didukung pengawasan komprehensif dan konstruktif

Sasaran pada urusan **Kepegawian Serta Pendidikan dan Pelatihan** meliputi;

Sasaran ke-6

Meningkatnya kualitas dan kapasitas birokrat Pemerintahan daerah dalam rangka mewujudkan good and clean governance

Sasaran pada urusan **Sekretariat Daerah** meliputi;

Sasaran ke-7

Menghadirkan birokrasi yang mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas dalam rangka mencapai efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan

Sasaran pada urusan **Sekretariat DPRD** meliputi;

Sasaran ke-8

Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akomodatif, aspiratif, dan inklusif

Sasaran pada urusan **Kearsipan** meliputi;

Sasaran ke-9

Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akuntabel melalui tata kelola kearsipan berbasis teknologi informasi dan melindungi memori kolektif rakyat.

Misi Ketiga “Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan upaya menambah peluang kerja dan peluang usaha melalui pengembangan ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menekan angka kemiskinan” ditetapkan tujuan yaitu;

Tujuan ke-1

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi potensi daerah.

Tujuan ke-2

Menghadirkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan didukung kemantapan infrastruktur dan konektivitas daerah.

Tujuan ke-3

Menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan aksesibilitas kesempatan kerja didukung pengembangan ekonomi kerakyatan pemberdayaan

Tujuan ke-4

Mewujudkan peningkatan keberdayaan masyarakat secara inklusif melalui penanggulangan kemiskinan secara terpadu.

Penetapan Sasaran Pembangunan Tujuan Misi Ketiga didukung 20 (Dua Puluh) Agenda Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah meliputi Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Tenaga Kerja, Transmigrasi, Pangan, Pertanahan, Lingkungan Hidup, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Perhubungan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Penanaman Modal, Kelautan dan Perikanan, Pariwisata, Pertanian, Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral, Perdagangan, Perindustrian, Keuangan, dan Sosial sebagaimana berikut;

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan ke-1 misi ke-3 ditetapkan sasaran strategis yaitu

Sasaran pada urusan **Penanaman Modal** meliputi;

Sasaran ke-1

Memajukan kualitas layanan dan kapasitas kelembagaan perizinan dalam rangka menjaga kondusifitas iklim investasi, meningkatkan kuantitas nilai investasi dan frekuensi usaha di Daerah

Sasaran pada urusan **Keuangan** meliputi;

Sasaran ke-2

Meningkatkan pendapatan asli daerah guna mendukung keberdayaan pembangunan dan kemandirian daerah serta mewujudkan penatausahaan asset dan pengelolaan keuangan yang akuntabel, transparan, dan tertib administrasi berbasis akuntansi akrual

Sasaran pada urusan **Pariwisata** meliputi;

Sasaran ke-3

Meningkatnya kunjungan wisata yang didukung pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan ketersediaan fasilitas publik untuk berekspresi, berpromosi, dan berinteraksi dalam pengembangan ekonomi kreatif

Sasaran pada urusan **Pangan** dan **Pertanian** meliputi;

Sasaran ke-4

Mencapai kemandirian pangan dan diversifikasi konsumsi pangan daerah didukung peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya pertanian secara berkelanjutan

Sasaran pada urusan **Kelautan dan Perikanan** meliputi;

Sasaran ke-5

Mencapai swasembada produksi perikanan dan keberdayaan ekonomi nelayan dengan memacu optimalisasi kapasitas dan kontinuitas inovasi teknologi perikanan

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan ke-2 misi ke-3 ditetapkan sasaran strategis yaitu;

Sasaran pada urusan **Lingkungan Hidup** dan **Kehutanan** meliputi;

Sasaran ke-6

Meningkatnya kualitas lingkungan hidup secara menyeluruh dan berkelanjutan

Sasaran pada urusan **Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang** meliputi;

Sasaran ke-7

Menciptakan pembangunan infrastruktur daerah yang berkelanjutan, dan berdaya saing serta mewujudkan harmonisasi pembangunan berlandaskan tata ruang.

Sasaran pada urusan **Perhubungan** meliputi;

Sasaran ke-8

Menguatkan konektivitas transportasi antar wilayah Gresik dengan prioritas keselamatan, ketepatan waktu layanan, kelengkapan sarana prasarana penunjang transportasi, dan mempertimbangkan daya dukung lingkungan

Sasaran pada urusan **Pertanahan** meliputi;

Sasaran ke-9

Mewujudkan kepastian hukum didukung optimalisasi performance pelayanan pertanahan

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan ke-3 misi ke-3 ditetapkan sasaran strategis yaitu

Sasaran pada urusan **Tenaga Kerja** dan **Transmigrasi** meliputi;

Sasaran ke-10

Membangun tenaga kerja yang berdaya saing disertai peningkatan kualitas dan kapasitas produktifitas serta Mewujudkan harmonisasi hubungan industrial yang selaras dengan kondusifitas iklim ketenagakerjaan.

Sasaran pada urusan **Perdagangan, Perindustrian, dan Energi dan Sumber Daya Mineral** meliputi;

Sasaran ke-11

Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah dengan memacu produktivitas perdagangan dalam iklim usaha yang kondusif dan berdaya saing didukung pertumbuhan industri mikro, kecil, dan menengah secara berkelanjutan

Sasaran pada urusan **Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah** meliputi;

Sasaran ke-12

Menguatkan daya saing, peningkatan kinerja, dan menstimulasi pertumbuhan usaha UMKM dan Koperasi yang inovatif

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan ke-4 misi ke-3 ditetapkan sasaran strategis yaitu

Sasaran pada urusan **Sosial** meliputi;

Sasaran ke-13

Menghadirkan peningkatan kualitas layanan sosial yang berkelanjutan, berkeadilan dan merata dengan mendekatkan jangkauan layanan kepada masyarakat dan keberdayaan partisipatoris serta penguatan penanggulangan kemiskinan secara menyeluruh.

Sasaran pada urusan **Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman** meliputi;

Sasaran ke-14

Mendorong percepatan pengentasan lingkungan kumuh didukung kemudahan akses terhadap perumahan dan peningkatan kualitas rumah layak huni

Sasaran pada urusan **Pemberdayaan Masyarakat dan Desa** meliputi;

Sasaran ke-15

Mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan menuju kemandirian ditopang peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintahan desa yang professional, optimalisasi perekonomian desa, dan keberdayaan masyarakat yang sejahtera.

Misi Keempat “Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemerataan layanan kesehatan, mewujudkan pendidikan yang berkelanjutan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya” ditetapkan tujuan yaitu;

Tujuan ke-1

Meningkatkan kualitas hidup manusia melalui penguatan atribusi layanan pendidikan dan kesehatan

Menghadirkan keadilan dan kesetaraan Gender dalam pembangunan

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan ke-1 misi ke-4 ditetapkan sasaran strategis yaitu

Sasaran pada urusan **Pendidikan** meliputi

Sasaran ke-1

Menghadirkan pelayanan pendidikan yang berkualitas berlandaskan perluasan aksesibilitas, penguatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan serta peningkatan penyelenggaraan pendidikan yang menyeluruh pada aspek suprastruktur dan infrastruktur pendidikan

Sasaran pada urusan **Kesehatan** meliputi;

Sasaran ke-2

Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, ibu dan anak, status gizi, dan pengendalian penyakit secara berkelanjutan didukung pemerataan akses dan mutu pelayanan

Sasaran pada urusan **Perpustakaan** meliputi;

Sasaran ke-3

Membangun Gresik Cerdas melalui inisiasi budaya gemar membaca.

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan ke-2 misi ke-4 ditetapkan sasaran strategis yaitu

Sasaran pada urusan **Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak** meliputi;

Sasaran ke-4

Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kualitas keluarga dalam rangka perlindungan terhadap perempuan dan anak serta mewujudkan pembangunan berlandaskan kesetaraan dan keadilan Gender

Sasaran pada urusan **Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana** meliputi;

Sasaran ke-5

Mengendalikan kuantitas, jumlah kelahiran, penambahan, dan laju pertumbuhan penduduk didukung optimalisasi program Keluarga Berencana dan pembangunan keluarga sejahtera

Bab V

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Perubahan

Rencana program dan kegiatan prioritas merupakan uraian rinci yang menjelaskan nama program, nama kegiatan, indikator keluaran (output) kegiatan maupun keluaran program (outcome), sasaran dari kegiatan, satuan, volume, target, serta pagu indikatif pendanaannya. Klasifikasi program dan kegiatan dituangkan secara lengkap dalam matrik rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Pada tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Gresik menetapkan tema **“Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan dan Pemerataan Perekonomian Untuk Kesejahteraan Masyarakat”** dengan memperhatikan Prioritas Pembangunan melalui Keputusan Bersama DPRD Kabupaten Gresik Dan Bupati Gresik Provinsi Jawa Timur Nomor 188/3/437.40/2016 dan 188/5/437.12/2016 Tentang Persetujuan Bersama Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021 untuk Ditetapkan Menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Gresik.

Rencana rincian Pendapatan dan penganggaran belanja perubahan tahun 2016 disajikan pada **Lampiran 1** dan **Lampiran 2**.

Bab VI

Penutup

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Kabupaten Gresik Tahun 2016 merupakan upaya pemerintah daerah untuk mengakomodasi dinamika perubahan penyelenggaraan pemerintahan yang dipengaruhi oleh pelbagai faktor meliputi perkembangan makro ekonomi di tingkat global maupun daerah, konstelasi sosial politik, perubahan kebijakan nasional, aspirasi bottom up bottom up yang dilandasi keraifan lokal, serta menghadirkan pemerintah daerah yang lebih optimal dalam mengimplentasikan fungsi pelayanan kepada masyarakat dan mencapai prioritas-prioritas pembangunan Kabupaten Gresik Tahun 2016.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Kabupaten Gresik Tahun 2016 secara yuridis didasarkan pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015. Sedangkan secara substansial dalam penyusunan RKPD ini berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019, Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016, RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019, RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2016, RPJPD Kabupaten Gresik Tahun 2005-2025, Keputusan Bersama DPRD Kabupaten Gresik Dan Bupati Gresik Provinsi Jawa Timur Nomor 188/3/437.40/2016 dan 188/5/437.12/2016 Tentang Persetujuan Bersama Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021 untuk Ditetapkan Menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Gresik, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030, serta memperhatikan dinamika lingkungan penyelenggaraan pemerintahan maupun perkembangan kerangka ekonomi daerah beserta pelbagai faktor yang mempengaruhinya.

Demikian Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Kabupaten Gresik Tahun 2016 disusun untuk menjadi pedoman dalam perumusan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2016 Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan dan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016.

Gresik, Agustus 2016

BUPATI GRESIK

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST, M.Si.